



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI VIII DPR RI**

**(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

- Tahun Sidang** : 2020-2021  
**Masa Persidangan** : V  
**Rapat Ke** : 8  
**Jenis Rapat** : Rapat Kerja  
**Dengan** : Menteri Agama RI  
**Sifat Rapat** : Terbuka  
**Hari, Tanggal** : Senin, 31 Mei 2021  
**Waktu** : 13.00 s.d Selesai  
**Tempat** : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, PT 10270
- Acara** :  
1. Pembahasan Tindak Lanjut Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M;  
2. Isu-isu Aktual Lainnya.
- Ketua Rapat** : H. Yandri Susanto, S.Pt. (F-PAN)  
**Sekretaris Rapat** : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
- Hadir** : 43 anggota dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI  
**Anggota yang Hadir** : **Anggota dari 50 Anggota**
- PIMPINAN:**
1. H. Yandri Susanto, S. Pt. (F-PAN)
  2. Laksdya. TNI (Purn) Moekhlis Sidik, MPA. (F-Partai Gerindra)
  3. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si (F-PDIP)
  4. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-P. Golkar)
  5. H. Marwan Dasopang (F-PKB)
- ANGGOTA:**
- FRAKSI PDI PERJUANGAN**
6. I Komang Koheri, S.E.
  7. Paryono, S.H., M.H.
  8. Selly Andriany Gantina, A.Md.
  9. Umar Bashor
  10. Ina Ammania
  11. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya
  12. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.
  13. H. Rachmat Hidayat, SH.
  14. Matindas J. Rumambi, S.Sos.

15. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
16. H. Arwan M. Aras T., S. Kom.

**FRAKSI PARTAI GOLKAR**

17. Mohmmad Saleh, S.E.
18. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., MM
19. Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M.
20. Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H.
21. Muhammad Ali Ridha

**FRAKSI PARTAI GERINDRA**

22. M. Husni, S.E., M.M.
23. Abdul Wachid
24. Dr. Jefry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.
25. Drs. H. Zainul Arifin
26. Drs. H. Saiful Rasyid, MM.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**

27. Hj. Lisda Hendrajoni, SE., MM. Tr.
28. Dra. Delmeria
29. Ach. Fadil Muzakki Syah, S. Pd. I.
30. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

31. MF. Nurhuda Y
32. H. Maman Imanul Haq

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

33. Drs. H. Achmad, M.Si..
34. Ir. H. Nanang Samodra, K.A., M.Sc.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

35. H. Iskan Qolba Lubis, MA.
36. K.H. Bukhori, Lc., MA.
37. Dr. H. M. Hidayat Nurwahid, M.A.
38. Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A.
39. Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

40. H. Mhd. Asli Chaidir, S.H.
41. H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

42. K.H. Muslich Zainal Abidin
43. H. Iip Miftahul Choiry, S.Pd.I

- Anggota yang Izin** :
1. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H. (F-Partai Golkar)
  2. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag. (F-PKB)
  3. Wastam, S.E., S.H (F-Partai Demokrat)
- Undangan** : Menteri Agama RI beserta jajaran

## **JALANNYA RAPAT**

### **KETUA RAPAT KOMISI VIII / F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):**

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat Siang

Salam Sejahtera buat kita semua

Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran.

Yang terhormat para Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI baik yang mengikuti secara langsung di ruangan Komisi VIII maupun melalui virtual.

Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri rapat kerja ini dalam keadaan sehat walafiat dengan agenda sebagaimana yang sudah kami kirimkan ke Pak Menteri, hari ini kita akan membahas mengenai tindak lanjut penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1442 Hijriyah atau Tahun 2021 Masehi serta isu-isu aktual.

Sebagaimana biasa Pak Menteri dan Para Anggota yang berbahagia, sebelum rapat ini kita mulai mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, bagi yang beragama islam marilah kita membaca *umul kitab* al-fatihah

#### **BERDOA : MULAI**

Selesai.

#### **BERDOA : SELESAI**

Pak Menteri kami ucapkan terima kasih Pak sudah memenuhi undang kami di tengah kesibukan yang luar biasa karena agenda yang sangat penting dan kami lihat ini *full team* ini ya Pak Menteri ya luar biasa.

Sebelum kami lanjutkan, kami perkenalkan dulu Pak Menteri ada pemain baru, ini benar-bener baru ini Pak belum pernah main ini selama ini baru latihan saja diluar Pak. Ini Muhammad Rijal Pak, Muhammad Rijal ini anggota DPR RI dari Fraksi PAN menggantikan almarhum Ali Taher Parasong Pak, Dapil Banten III ya, dan selanjutnya masih dalam bulan Syawal hari ini 19 Syawal kami dari meja Pimpinan mengucapkan selamat hari raya idul fitri, mohon maaf lahir batin.

Kemudian sesuai dengan Acara rapat-rapat di DPR Masa Persidangan ke-5 Tahun Sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi, dan sesuai dengan putusan Rapat Internal Komisi VIII maka pada hari ini Senin, 31 Mei 2021, Komisi VIII DPR RI mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia untuk membahas mengenai isu strategis yang terkait dengan tindak lanjut penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 atau tahun 1442 hijriyah beserta isu-isu aktual.

Berdasarkan laporan dari sekretariat komisi, kita tetap membatasi anggota yang hadir, sudah hadir *alhamdulillah* 12 anggota, 30 anggota secara virtual dari 9 fraksi. Oleh karena itu berdasarkan tata tertib DPR Pasal 251 ayat (1) kuorum sudah tercapai. Atas persetujuan Pak Menteri dan seluruh hadirin Anggota Komisi VIII izinkan kami membuka rapat kerja ini dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* rapat kerja ini terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.25 WIB)**

Baik, agenda kita pada hari ini, pertama pengantar dari Pimpinan Rapat, yang kedua penjelasan dari Menteri Agama tentang agenda hari ini, yang ketiga tentu respon atau tanya jawab dari anggota termasuk dari meja Pimpinan, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima penutup.

Apakah agenda ini bisa kita setujui? Setuju ya.

### **(RAPAT: SETUJU)**

Baik, kita mulai tadi rapat jam 13.25, kita akhiri 15.30 dulu ya setengah 4, setuju ya? Nanti kita kalau masih perlu kita perpanjang kita perpanjang, tapi mudah-mudahan selesai, setuju ya?

### **(RAPAT: SETUJU)**

Baik, Pak Menteri yang hormati beserta seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Komisi VIII, sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi agenda rapat kita hari ini tentu sangat dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia Pak Menteri, khususnya para calon jamaah haji yang mereka tahun 2020 belum bisa berangkat, sekarang menunggu kepastian berangkat, apakah berangkat atau tidak tentu inilah yang harus kita pastikan atau kita bahas secara mendalam pada hari ini.

Sebagaimana kita ketahui, kita memantau terus usaha maksimal dari Menteri Agama beserta seluruh jajaran termasuk Menteri Luar Negeri, pemerintah Indonesia sudah sangat maksimal untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang persiapan haji tahun ini, mitigasinya sudah luar biasa, dari segala bersiap secara teknis saya kira kami sudah melihat kesungguhan dari Kementerian Agama, sebenarnya dari sisi teknis sudah tidak ada masalah. Oleh karena itu tinggal bagaimana apakah mungkin Saudi Arabia yang punya otoritas penuh untuk mengatakan Indonesia bisa mengirimkan calon jamaah haji atau tidak, maka informasi ini penting untuk kita ketahui, dan sebagaimana kita dapatkan informasi dari 20 negara yang selama ini diberi sanksi atau tidak boleh masuk ke negara Saudi ternyata ada 11 negara yang sebelumnya tidak boleh menjadi boleh, diantaranya Amerika, saya sebut pertama Amerika Pak Menteri ya, yang kedua ada Inggris, ketiga Irlandia, kemudian Jepang, Jerman, Perancis, Portugal, Swedia, Swiss, dan tentu ada satu negara muslim yaitu Uni Emirat Arab, diantara 11 negara itu hanya satu negara yang mayoritas muslim Pak Menteri, oleh karena itu ini perlu kita cermati kebijakan Saudi ini untuk kita antisipasi di masa-masa yang akan datang. Nah apakah landasan Saudi itu berdasarkan penanganan Covid di

negara masing-masing atau ada pertimbangan lain, saya kira ini menjadi perhatian kita semua.

Termasuk mengenai vaksinasi Pak Menteri, ini sesuai dengan rapat kita sebelum bulan puasa, kita mentargetkan akhir Mei ini sudah vaksin semua termasuk calon jamaah haji dengan Sinovac, ternyata Sinovac ini tidak masuk dalam empat yang ditetapkan oleh Saudi, kita tidak juga tau apa kriteria atau parameter Saudi Arabia menetapkan empat vaksin yang boleh masuk ke Saudi yaitu diantaranya Astra Zeneca, kemudian Johnson, Pfizer, dan Moderna. Nah artinya Sinovac yang jadi masalah kalau kita dibolehkan mendapatkan kuota ternyata calon jamaah haji kita suntik dengan Sinovac ya gak bisa juga Pak Menteri. Nah yang jadi masalah orang sudah divaksin gak bisa juga vaksin beruntun dengan vaksin yang berbeda.

Nah ini mungkin jadi pr kita semua untuk kedepan komunikasi atau memastikan vaksin yang dibolehkan oleh Saudi itu kita pastikan juga Pak Cholil karena jangan sampai kita pakai Sinovac ternyata Saudi memakai yang lain, walaupun itu ada politik dagangnya atau yang lain ya tetap harus kita pantau sedemikian rupa karena itu akan merugikan pihak calon jamaah haji bilamana kuota dibuka tetapi vaksinya tidak bisa kita pakai untuk masuk ke Saudi, ini mungkin perhatian di bidang vaksin termasuk berarti dengan lobi Kementerian Luar Negeri dengan pemerintah Saudi karena kalau bilamana kalau dari informasi yang kami dapat sepertinya jamaah haji tahun ini juga belum bisa kita pastikan berangkat Pak Menteri.

Nah oleh karena itu kami minta kepada Pak Menteri untuk selalu atau dalam waktu dekat satu dua hari ini berkomunikasi dengan Pak Presiden Pak Jokowi supaya ada kepastian Pak Menteri, kalau memang Saudi tidak bisa membuka dan saya kira tidak ada salah pemerintah Indonesia kalau otoritas Saudi Arabia menutup Indonesia maka kesalahan itu bukan di Indonesia tapi karena memang Saudi sudah tidak bisa menerima calon jamaah haji diluar 11 negara tadi.

Nah saya tegaskan kembali kepada para hadirin para seluruh bangsa Indonesia, dari sisi persiapan Komisi VIII dan Kementerian Agama sudah sangat siap untuk memberatkan calon jamaah haji kita baik dari sisi anggaran kemudian dari semua aspek yang dibutuhkan itu sudah sangat siap tetapi sekali lagi yang berhak mengeluarkan kebijakan boleh atau tidak berangkat adalah Saudi Arabia.

Oleh karena itu kami kasih kesempatan kepada Pak Menteri satu dua hari ini untuk berkomunikasi kepada Pak Presiden sehingga ada kepastian karena tahun lalu Pak Menteri kami ingat Menteri Agama waktu itu mengumumkan pembatalan haji tanggal 10 syawal Pak, hari ini sudah tanggal 19 syawal artinya sudah sangat melebihi waktu-waktu yang sudah kita harapkan skenario bilamana kita bisa memberatkan calon jamaah haji terhadap waktu yang dibutuhkan. Maka kami akan mendukung akan *mem-backup* atau sama-sama bertanggungjawab Pak Menteri bilamana nanti apapun keputusan Pemerintah Republik Indonesia terhadap kebijakan haji tahun ini bilamana nanti sudah komunikasi dengan Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.

Saya kira itu Pak Menteri, kita dengarkan para anggota para Pimpinan penjelasan dari Menteri Agama Republik Indonesia terhadap persiapan haji atau nasib pelaksanaan haji tahun ini. Kepada Pak Menteri kami persilakan.

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA (YAQUT CHOLIL QOUMAS):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi untuk melakukan rapat kerja pada hari ini.

Dalam kesempatan yang baik ini tentu kami harus menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang selalu memberikan dukungan dan perhatian terhadap upaya peningkatan kinerja Kementerian Agama khususnya terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang siang ini akan kita bicarakan kembali.

Selain itu ini mumpung masih syawal belum terlambat saya kira untuk saya atas nama pribadi dan atas nama Kementerian Agama beserta seluruh staf menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri kepada Bapak Ibu sekalian, *taqoballahu minna waminkum* mohon maaf lahir dan batin, semoga kita dipertemukan dengan Ramadhan dan Syawal tahun depan.

Selanjutnya sesuai dengan agenda hari ini izinkan kami untuk menyampaikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan tindak lanjut persiapan ibadah haji tahun 1442 hijriyah atau 2021 masehi. Proses persiapan penyelenggaraan haji tahun 1442 hijriyah atau 2021 masehi terus kami lakukan termasuk menyiapkan sejumlah skenario jika Indonesia diundang untuk memberangkatkan jemaah haji tahun ini di tengah suasana pandemi Covid-19, kami sudah membuat skenario pembatasan kuota hahi mulai dari 50%, 30%, 25%, 20%, hingga 5% dari kuota normal, serta bagaimana menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 hijriyah dan penyusunan skema mitigasi penyelenggaraan haji pada masa pandemi Covid-19, kami sudah dan akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti halnya dengan Komisi VIII DPR RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, serta Satgas Covid-19 dan WHO perwakilan Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi serta penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang terus memberikan masukan untuk kami dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Pimpinan, Anggota Komisi VIII DPR RI, dan hadirin yang kami hormati

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum juga memberikan kepastian, sekali lagi belum memberikan kepastian, apakah penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 hijriyah atau 2021 masehi akan dilaksanakan seperti halnya tahun 2020 yang lalu yaitu hanya bagi jemaah dalam negerinya atau akan pula mengundang jemaah haji dari luar Arab Saudi.

Hitungan kami waktu yang tersisa sampai dengan *closing date* bandara Arab Saudi yang jatuh pada tanggal 4 Dzulhijah 1442 Hijriyah atau 14 Juli 2021, tinggal sekitar satu setengah bulan. Berbagai persiapan dalam negeri meskipun sudah sejak beberapa waktu yang lalu kami siapkan, namun belum bisa sepenuhnya difinalisasi, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan BIPIH, penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, pelaksanaan bimbingan manasik dan lain sebagainya yang semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji secara resmi kita terima dari pemerintah kerajaan Saudi.

Demikian pula halnya dengan penyiapan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi darat jemaah haji di Arab Saudi. Finalisasi layanan jemaah di Arab Saudi memerlukan informasi mengenai ketentuan-ketentuan perhajian tahun berjalan seperti besaran kuota, pengaturan mengenai protokol kesehatan haji, dan lain sebagainya, sebagaimana diatur dan disepakati dalam MoU dan *ta'limatul haji* yang hingga hari ini belum juga dilakukan.

Skenario keberangkatan haji Indonesia berdasarkan besaran kuota dan kaitannya dengan batas waktu terakhir diterimanya informasi besaran kuota haji Indonesia adalah sebagai berikut,

Jika kuota haji reguler kita ambil 30%, itu artinya jumlah jemaah sekitar 60.996 calon jemaah, jumlah kloternya itu ada 172 kloter, tenggat waktu maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi 11 Mei 2021, ini sudah lewat, sementara keberangkatan kloter pertama jemaah kita estimasikan di tanggal 27 Juni 2021.

Jika kuota haji diberikan 25% dari haji reguler maka jumlah jemaah sekitar 50.830 calon jemaah dengan jumlah kloter 139 kloter, hitungan kami tenggat waktu maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi harus selesai di tanggal 14 Mei 2021, ini juga sudah lewat. Keberangkatan kloter pertama jemaah diestimasi 30 Juni 2021.

Jika 20% kuota yang diberikan maka jumlah jemaah haji kurang lebih 40.664 dengan jumlah kloter 111 kloter dan tenggat waktu maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi 17 Mei 2021, ini lewat juga. Keberangkatan kloter pertama jemaah estimasinya 3 Juli 2021.

Jika yang diberikan adalah 10%, maka jumlah jemaah itu sekitar 20.332 jemaah dan jumlah kloternya ada 57 dan tenggat maksimal pemberian

kuota dari Arab Saudi harus sudah kita terima tanggal 22 Mei 2021. Sementara keberangkatan kloter pertama kita estimasikan 8 Juli 2021.

Jika kuota haji diberikan 5%, maka jumlah jamaah yang bisa kita berangkatkan adalah 10.166 dengan jumlah kloter 30 dan tenggat maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi 25 Mei 2021, ini juga sudah lewat. Sementara keberangkatan kloter pertama kita estimasi 11 Juli 2021.

Kita akan turun lagi jika kuota menjadi 1,8%, ini catatannya adalah skema kuota 1,8% ini mengacu pada informasi mengenai kemungkinan besaran kuota haji untuk jamaah dari luar Saudi sebanyak 45.000 dari besaran jumlah jamaah haji setiap tahunnya yang berkisar sebanyak 2,5 juta jamaah, baik dari dalam negeri Arab Saudi maupun dari luar Arab Saudi. Dengan demikian 1,8% ini ekuivalen dengan 3660 calon jamaah dengan kloter 12 tenggat waktu maksimal 28 Mei dan keberangkatan kloter pertama kita estimasikan 13 Juli 2021.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI serta hadirin yang saya hormati.

Pada kesempatan yang baik ini kami juga akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkembangan terkini mengenai Covid-19, penerapan protokol kesehatan dan pembatasan prosesi ibadah dalam kaitannya dengan skema penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 hijriyah 2021 masehi pada masa pandemi Covid-19.

Yang pertama perkembangan terkini, di Indonesia dan beberapa negara tetangga dan negara pengirim jamaah haji. Pemerintah pada hari Kamis, 27 Mei 2021, sudah menyampaikan penilaian terhadap pengendalian pandemi Covid-19 tingkat provinsi. Ada empat kategori penilaian yaitu a, b, c, d, dan e. dari kategori penilaian tersebut tidak ada wilayah yang mendapat penilaian a ataupun b dalam hal pengendalian Covid-19, dari 34 provinsi, 10 provinsi mendapat nilai c, 23 provinsi mendapat nilai d, dan 1 provinsi mendapat nilai e. jumlah kasus baru di Indonesia dalam sepekan terakhir juga masih diatas 5000 per hari, belum ada penurunan yang cukup signifikan, bahkan pada 27 Mei 2021 angka kasus harian mencapai 6278. Tren belum adanya penurunan kasus harian yang signifikan ini juga terjadi di beberapa negara pengirim jamaah haji terbesar, berikut data kasus harian pada negara pengirim jamaah haji terbesar.

Yang pertama Arab Saudi per tanggal 21 Mei ada 1136 kasus, tanggal 22 Mei 1142 kasus, tanggal 23 Mei 1067 kasus, tanggal 24 Mei 1157 kasus, tanggal 25 Mei 1389 kasus, tanggal 26 Mei 1320 kasus, dan di tanggal 27 Mei 1183 kasus.

Indonesia pada 21 Mei tercatat 5746 kasus, kemudian 22 Mei 5296 kasus, 23 Mei 5280 kasus, 24 Mei 5097 kasus, 25 Mei 5060 kasus, 26 Mei 5034 kasus, 27 Mei 6278 kasus.

Sementara India yang baru saja mengalami *booming* tanggal 21 Mei tercatat 257.299 kasus, 22 Mei 240.842 kasus, 23 Mei 222.315 kasus, 24 Mei 196.427 kasus, naik kembali di tanggal 25 Mei menjadi 280.921 kasus,



tanggal 26 Mei 211.298 kasus, dan angka yang sama terjadi di tanggal 27 Mei 2021.

Begitu seterusnya sampai yang terakhir pengirim terbesar adalah Aljazair. Tanggal 21 Mei Aljazair menemukan 278 kasus, di 22 Mei 217 kasus, 23 Mei 209 kasus, 24 Mei 247 kasus, 25 Mei 254 kasus, 26 Mei 285 kasus, dan melonjak kembali di 27 Mei 280 kasus.

Peningkatan kasus harian Covid-19 juga masih terjadi di 4 negara tetangga Indonesia dengan data sebagai berikut. Malaysia tanggal 21 Mei tercatat 6493 kasus, 22 Mei 6320 kasus, 23 Mei 6976 kasus, 24 Mei 6509, 25 Mei 7289 kasus, 26 Mei 7478 kasus, dan melonjak di tanggal 27 Mei menjadi 7857 kasus.

Singapura 21 Mei 40 kasus, 22 Mei 29 kasus, 23 Mei 25 kasus, 24 Mei 36 kasus, 25 Mei 30 kasus, 26 Mei 26 kasus, 27 Mei 24 kasus.

Filipina 21 Mei 6248 kasus, 22 Mei 6814 kasus, 23 Mei 1595 kasus, 24 Mei 4894 kasus, 25 Mei 3966 kasus, 26 Mei 5034 kasus, dan melonjak di 27 Mei menjadi 6483 kasus.

Thailand di tanggal 21 Mei 3481 kasus, 22 Mei 3052, 23 Mei 3382 kasus, 24 Mei 2713 kasus, 25 Mei 3226 kasus, 26 Mei 2455 kasus, dan meningkat kembali di 27 Mei menjadi 3323 kasus.

Sebagaimana kita tau bersama, pelaksanaan ibadah haji adalah *the biggest mass gathering event in the world* yang dilaksanakan pada kurun waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Penularan Covid-19 utamanya berasal dari interaksi dengan orang yang terpapar Covid-19 baik dengan gejala atau tanpa gejala.

Oleh karena itu informasi mengenai tren belum menurunnya secara signifikan mengenai jumlah kasus baru Covid-19 diatas menjadi hal yang penting yang perlu kita sikapi bersama.

Kemudian yang terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, karena pandemi ada keharusan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji, protokol kesehatan itu diterapkan sejak sebelum keberangkatan, saat berada di Arab Saudi dan setelah kembali ke tanah air. Beberapa penerapan protokol kesehatan itu diantara lain.

Yang pertama pra keberangkatan, skenario kita jamaah akan dikarantina di asrama haji selaam 3x24 jam, sebelum kedatangan di asrama haji, jamaah harus terlebih dahulu menjalani swab antigen secara mandiri. Selanjutnya menjelang keberangkatan dilakukan tes PCR Swab, jika negatif jamaah haji dapat diberangkatkan ke Arab Saudi, namun jika Positif akan dilakukan isolasi mandiri di asrama haji.

Yang kedua, setibanya di Arab Saudi, jamaah haji akan dikarantina selama 3x24 jam di hotel dengan kapasitas maksimal 2 orang per kamar, setelah 2x24 jam akan dilakukan tes PCR Swab, jika negatif jamaah bisa melaksanakan umrah, jika positif akan dilakukan isolasi mandiri.

Ketiga, seluruh rangkaian ibadah di Masjidil Haram baik umrah maupun tawaf ifadah harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan penjadwal dan pengawasan yang ketat.

Yang keempat, pergerakan jamaah saat puncak ibadah haji menyesuaikan dengan ketentuan Arab Saudi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Yang kelima, selesai melakukan seluruh proses haji di Mekah, jamaah akan diberangkatkan ke Madinah, jamaah ditempatkan pada hotel yang sudah ditentukan dengan komposisi 1 kamar maksimum ditempati 2 orang, jamaah akan tinggal di Madinah selama 3 hari sehingga tidak ada pelaksanaan sholat arbain.

Langkah keenam, sebelum pulang ke tanah air, jamaah haji akan melakukan tes PCR Swab, jika hasilnya negatif jamaah haji dipulangkan ke tanah air, jika positif dilakukan isolasi mandiri pada hotel di Madinah.

Yang ketujuh setibanya di tanah air, jamaah haji akan dikarantina di asrama haji selama 5x24 jam. Jamaah haji akan menjalani tes PCR Swab pada hari pertama karantina, dan hari kelima karantina, jika hasil PCR Swab nya negatif pada hari kelima, jamaah haji diizinkan pulang ke rumah atau daerahnya masing-masing, namun jika positif akan dilakukan isolasi mandiri di asrama haji.

Langkah yang kedelapan, selama proses penyelenggaraan haji, jamaah dan petugas wajib menerapkan protokol kesehatan dan disiplin 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi interaksi dan mobilitas).

Kemudian pembatasan ibadah selama di Arab Saudi. Penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2020 diikuti oleh jamaah dalam jumlah yang sangat terbatas, Arab Saudi hanya mengizinkan orang-orang yang berdomisili di Arab Saudi dengan jumlah 1000 orang dan 13 diantaranya adalah WNI ekspatriat yang tinggal di Saudi. Saat itu banyak pembatasan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tahun ini saat masih dalam kondisi pandemi, kami memperkirakan, sekali lagi kami memperkirakan Arab Saudi juga akan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dampak dari penerapan prokes ketat adalah adanya sejumlah pembatasan bagi jamaah dalam menjalani ibadah.

Berkaca pada penyelenggaraan umrah pada awal tahun lalu, pembatasan itu diantaranya adalah larangan sholat di Hijr Ismail dan berdoa di sekitar Multazam, shaf saat mendirikan salat juga diatur berjalan, ada juga pembatasan untuk sholat berjamaah baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Kami juga memperkirakan bahwa Saudi juga akan secara ketat mengatur prosedur pelaksanaan ibadah pada puncak haji baik di arafah, muzdalifah, mina, dan saat lontar jumrah, termasuk juga saat pelaksanaan umrah wajib dan tawaf ifadah. Semua harus dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak terutama pada penyelenggaraan arba'in karena masa tinggal di Madinah hanya sekitar 3 hari, maka dipastikan jamaah tidak bisa menjalankan ibadah arba'in, terkait sejumlah pembatasan ini, Dirjen PHU sudah menerbitkan buku manasik haji di masa pandemi, buku ini sekarang dalam proses finalisasi dan diharapkan bisa dicetak untuk dijadikan panduan bagi jamaah haji.

Penanganan Covid saya kira ini menjadi isu yang sangat penting sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, jadi kalau dikatakan penanganan Covid, Indonesia ini sebenarnya termasuk relatif bagus karena kalau didasar urutan, USA ini peringkat pertama penanganan Covid terburuk di dunia, Perancis itu di ranking delapan terburuk, Itali sembilan terburuk, Jerman 17 terburuk, Indonesia ini mending 19 Pak rankingnya jadi masih ada ranking di atasnya yang buruk-buruk itu Pak.

Nah terkait dengan vaksin yang tadi disampaikan Pak Ketua ada empat vaksin ini saya kira mungkin yang paling kompeten menjawab soal vaksin ini adalah Kementerian Kesehatan, tapi dari isu ini kami juga sudah merespon bersama dengan Kementerian Kesehatan kami sudah mengusahakan untuk bisa mendapatkan salah satu dari empat vaksin yang disyaratkan, kita dapat Johnson & Johnson, karena kalau dilihat tiga vaksin yang lain ini agak sulit secara teknis kita gunakan untuk jamaah haji, Johnson & Johnson ini hanya sekali *shot* dan kita atas ikhtiar bersama dengan Kementerian Kesehatan sudah mendapatkan komitmen untuk bisa mendapatkan vaksin untuk jamaah haji.

Komunikasi dengan presiden tentu kami akan lakukan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Ketua dan Pimpinan yang saya hormati, nanti akan segera setelah rapat ini kami akan komunikasikan dengan presiden agar kita bisa segera mengambil langkah yang paling pas terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini.

Kemudian dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk juga menyampaikan beberapa isu aktual dan alternatif solusinya. Yang pertama pelaksanaan rekrutmen PPPK Kementerian Agama, banyaknya guru madrasah dan guru agama yang berstatus honorer melatarbelakangi upaya Kementerian Agama untuk mengusulkan formasi PPPK sebagai guru agama dan guru madrasah. Jumlah formasi yang diusulkan pada 2021 sudah ditetapkan sebanyak 9495 PPPK guru madrasah dan 27.303 PPPK guru pendidikan agama, dengan rincian sebagai berikut: guru pendidikan agama islam 22.927, guru pendidikan agama kristen 2727, guru pendidikan agama katolik 1207, guru pendidikan agama hindu 403, guru pendidikan agama 39.

Saat ini tim konsorsium yang dibentuk Menteri Agama untuk melakukan seleksi terhadap PPPK telah menyelesaikan beberapa tugas dalam pelaksanaan rekrutmen ini, antara lain menyusun rencana dan agenda kerja verifikasi dan sinkronisasi data, menyusun modul dan soal tes kompetensi teknis seleksi PPPK, dan instrumen wawancara. Khusus modul dan soal tes sudah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera di-*upload* ke dalam sistem aplikasi penerimaan PPPK.

Perlu juga kami sampaikan bahwa berdasarkan surat Kepala BKN Tanggal 28 Mei 2021 perihal pengadaan CASN tahun 2021, jadwal pendaftaran yang semula dilaksanakan pada 31 Mei 2021 ditunda mengingat masih terdapat beberapa peraturan pengadaan CASN tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh pemerintah, jadwal pelaksanaan tersebut akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kementerian PANRB dan BKN, kami berharap pelaksanaan rekrutmen ini dapat berjalan lancar dan dapat memenuhi sebagian besar harapan para guru honorer yang selama ini mengabdikan kepada bangsa dan negara melalui Kementerian Agama dengan mengajar baik di madrasah maupun di sekolah-sekolah umum sebagai guru pendidikan agama.

Kemudian regulasi turunan undang-undang pesantren, disahkannya undang-undang tentang pesantren pada rapat paripurna DPR RI tanggal 24 September 2019 dan kemudian ditandatangani oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2019 dan diundangkan menjadi undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren pada tanggal 16 Oktober 2019 menjadi titik awal dari langkah-langkah penataan penguatan kelembagaan dan pendidikan pesantren dalam rangka memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi secara maksimal kepada pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang pesantren menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan khasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil alamin* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

Sebelum hadirnya undang-undang pesantren, seluruh varian pendidikan pesantren menjadi bagian dari pendidikan keagamaan, setelah hadirnya undang-undang pesantren, penyelenggaraan pendidikan khas pesantren yang berbasis kitab kuning atau dirosa islamiyah dengan pola pendidikan mualimin mendapatkan pengakuan sebagai jenis pendidikan yang tersendiri. Dalam undang-undang pesantren dijelaskan bahwa pendidikan pesantren jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan dalam bentuk pendidikan *muadalah* dan pendidikan *diniyah* formal, sedangkan pendidikan pesantren jalur formal untuk jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan dalam bentuk *ma'had aly*.

Adanya varian satuan pendidikan tersebut pada hakikatnya merupakan ikhtiar untuk menjawab kekhawatiran langkanya kader ulama dan memberikan *civil effect* bagi dunia pesantren sebagai bagian dari ikhtiar konservasi dan pengembangan disiplin ilmu agama yang menjadi kekhasan pesantren.

Varian tersebut memberikan pilihan kepada pesantren untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan pesantren yang sesuai dengan tradisi akademik dan kekhasan masing-masing sekaligus sebagai upaya penyediaan akses pendidikan pesantren yang dapat dipilih oleh masyarakat.

Secara jelas undang-undang pesantren mengamanatkan adanya penataan dan penguatan kelembagaan dalam bentuk rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi. Semisal rekognisi terhadap lulusan pesantren, afirmasi sekaligus fasilitasi akses kuliah bagi santri lulusan pesantren berupa program beasiswa santri berprestasi dalam rangka afirmasi perluasan akses dan kesempatan kuliah di perguruan tinggi serta menyiapkan santri yang unggul, kompetitif, dan memiliki potensi akademik yang baik.

PBSB merupakan salah satu program strategis untuk meningkatkan kualitas penataan dan kelembagaan pesantren modal sosialnya demi mobilitas vertikal. PBSB menjadi penting untuk menciptakan kader ulama sekaligus ilmuwan santri yang moderat dan mampu berkomunikasi dengan siapapun dengan cara yang ma'ruf memiliki bekal pemahaman dan penguasaan ilmu agama atau *tafaqquh fiddin* yang mampu menentukan maslahat kemanusiaan atau *tafaqquh fi maslahatil haq* serta mampu mentransformasikan keberagaman dan kemanusiaannya sebagai bentuk solusi terhadap persoalan-persoalan dalam konteks kekinian.

Pesantren juga memiliki jejaring antar pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan itu terbentuk baik itu dari relasi guru murid atau alumni maupun dari sanad keilmuan, jejaring ini menjadi faktor potensial bagi pengembangan ekonomi umat, sinergi ekonomi antara pesantren bisa menjadi kekuatan yang dapat menopang perekonomian bangsa, dalam undang-undang pesantren terdapat beberapa pasal yang mengamanatkan pembentukan peraturan presiden peraturan menteri agama yang tentunya ada kebutuhan untuk penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait pesantren sehingga perlu ada revisi beberapa PP dan undang-undang.

Di ujung tahun 2020, tiga regulasi berupa peraturan menteri agama tentang pesantren yang merupakan turunan dari undang-undang tersebut sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama, PMA tersebut sudah ditandatangani oleh menteri agama Bapak Fakhru Rozi pada 30 November 2020. Ketiga regulasi tersebut adalah PMA No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, ini diundangkan pada 3 Desember 2020. Kemudian PMA No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, diundangkan pada 30 November 2020, dan PMA No. 32 Tahun 2020 tentang *Ma'had Aly* diundangkan pada 3 Desember 2020.

Selain ketiga PMA tersebut, terdapat pula amanat untuk pembentukan rancangan peraturan presiden tentang pendanaan dan penyelenggaraan pesantren. Tahap harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perpres ini sudah selesai dilakukan dan saat ini rancangan perpres tersebut tinggal menunggu ditetapkan Presiden Joko Widodo.

Kemudian revitalisasi UPQ berstandar internasional, optimalisasi peran unit percetakan Al-Quran melalui revitalisasi perlu direalisasikan mengingat kebutuhan Mushaf Al-Quran di Indonesia yang relatif tinggi sedangkan kapasitas produksi UPQ dalam satu tahun nya hanya mampu mencetak 300.000 eksemplar, jumlah mushaf yang dicetak ini dipandang tidak berbanding lurus dengan jumlah kebutuhan mushaf di Indonesia.

Sementara itu berdasarkan data LPMQ, jumlah penerbit mushaf sebanyak 288 penerbit dan yang memiliki mesin percetakan hanya 5% dari

jumlah tersebut. Para penerbit berharap pemerintah melalui UPQ dapat memfasilitasi layanan jasa percetakan mushaf Al-Quran melalui PNBP berdasarkan PP 59 tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.

Dengan demikian, UPQ diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan peradaban islam Indonesia yang menerbitkan mushaf Al-Quran dan buku-buku keislaman sebagai pusat edukasi, literasi, dan juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Indonesia. Lebih lanjut, UPQ diharapkan dapat disejajarkan dengan percetakan mushaf Al-Quran berkelas dunia yang memiliki daya tarik dengan standar berkualitas internasional dari bangunan mesin sampai bahan baku.

Adapun strategi pendanaan revitalisasi UPQ akan ditempuh melalui skema pendanaan yang berasal dari SBSN dan RM dari anggaran yang tersedia di Kementerian Agama khususnya pada dirjen bimbingan masyarakat islam.

Isu berikutnya terkait dengan penguatan moderasi beragama melalui kompetensi penceramah. Jaringan *stakeholders* Kementerian Agama yang berasal dari organisasi kemasyarakatan agama dan lembaga dakwah cukup luas, perlu berkontribusi dalam memecahkan problematika umat, salah satunya dengan melakukan bimbingan kepada para dai dengan menggandeng peran ormas islam dan lembaga dakwah. Fasilitas pembinaan ini untuk meningkatkan kompetensi para dai dalam menjawab dan merespon isu-isu aktual dengan strategi metode dakwah yang menitikberatkan pada wawasan kebangsaan atau sejalan dengan slogan *hubbul wathan minal iman*.

Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para dai juga sejalan dengan upaya penguatan moderasi beragama yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024. Saat ini moderasi beragama telah menjadi bagian dari arah kebijakan dan strategi pemerintah menuju revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Bimbingan teknis akan diselenggarakan oleh dirjen bimas islam baik di tingkat pusat maupun di tingkat instansi vertikal dengan menggandeng peran serta organisasi masyarakat islam setempat. Para dai yang sudah mengikuti bimtek akan memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan Kementerian Agama, diharapkan para dai yang sudah terbina akan bertambah wawasan serta kompetensi keilmuannya dan memiliki integritas kebangsaan yang tinggi untuk mensyi'arkan dakwah langsung kepada masyarakat tempatnya berdomisili melalui pendekatan kultur dan budaya setempat.

Isu berikutnya terkait dengan revitalisasi KUA. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA, Menteri Agama sudah menetapkan revitalisasi KUA sebagai program prioritas Kementerian Agama yang peluncuran program ini sudah dilakukan 29 Mei yang lalu kemarin di KUA Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, kami berharap *insyaallah* pada tahun 2021 ini akan diterapkan program revitalisasi KUA pada 100 KUA di seluruh Indonesia, sementara 6 diantara program revitalisasi ini akan dijadikan contoh atau sebagai KUA model, keenam KUA tersebut adalah KUA Kecamatan Ciawigebang, KUA Kecamatan Banjarnegara, KUA Kecamatan

Sewon, KUA Kecamatan Sidoarjo, KUA Kecamatan Gunung Sugih, dan KUA Kecamatan Biringkanaya.

Revitalisasi KUA akan berfokus pada tiga hal yaitu pertama adalah perbaikan infrastruktur KUA, perbaikan infrastruktur KUA meliputi perbaikan sarana dan prasarana pendukung, perbaikan tata kelola serta pengembangan jenis layanan dan bimbingan dan sistem data dan informasi yang terpadu. Yang kedua perluasan layanan cakupan KUA, perluasan ini meliputi konsultasi keluarga, bimbingan perkawinan, bina paham keagamaan, pengukuran penentuan arah kiblat, penerbitan akta ikrar wakaf dan konsultasi hukum islam serta beberapa layanan lain terkait layanan kehidupan beragama. Dan yang ketiga peningkatan kuantitas dan kualitas SDM KUA, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM KUA ini meliputi bimbingan teknis bagi penghulu maupun penyuluh agama islam dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengoperasian perangkat berbasis IT.

Disamping program revitalisasi KUA ini, Kementerian Agama juga sedang mengupayakan peningkatan status lahan KUA karena saat ini sebanyak 2609 KUA tidak berdiri diatas lahan milik Kementerian Agama. Kondisi ini menyulitkan dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur karena tidak sepenuhnya syarat pembangunan gedung KUA melalui salah satu sumber pendanaan yang ada yaitu SBSN sehingga untuk KUA-KUA tersebut, Kementerian Agama berupaya menyelesaikan problematika ini melalui rehabilitasi gedung KUA dengan anggaran yang bersumber dari rupiah murni.

Diantara langkah penting dan perlu dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat adalah mengupayakan pemberian hibah dari pemerintah daerah bagi KUA yang berdiri diatas lahan milik pemda. Kami telah dan akan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan pemda terkait agar upaya kami dapat terwujud sehingga aturan Kementerian Keuangan tentang pembangunan gedung layanan melalui mekanisme SBSN dapat terpenuhi.

Pimpinan para anggota Komisi VIII DPR RI dan hadirin yang saya hormati, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai tindak lanjut penyelenggaraan ibadah haji serta isu aktual yang berkembang dan alternatif solusinya. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat atas perhatian dan dukungannya selama ini kepada pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, semoga Allah SWT selalu meridhai amal dan pengabdian kita semua, amin ya rabbal alamin.

Terima kasih.

*wallahul muwaffiq ila aqwamithaariq.*

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Makasih Pak Menteri yang sudah memaparkan panjang lebar sangat detail tentang agenda hari ini termasuk isu-isu aktual diantaranya turunan dari Undang-Undang Pesantren, ini memang kado buat pesantren Pak Menteri, jadi dari Undang-Undang sudah diturunkan PMA, tiga PMA luar biasa.

UPQ saya kira, saya dengan Pak Prof. Kamar ini memang sangat lama berdiskusi bagaimana percetakan Al-Quran itu bisa berkelas dunia Pak, jadi kali ini gak perlu diragukan lagi dukungan dari Komisi VIII, kemudian revitalisasi KUA dan lain sebagainya.

Pak Menteri kalau dari penjelasan Pak Menteri tadi, para hadirin atau anggota supaya kita konsentrasi nanti para anggota dan Pimpinan. Di tabel halaman dua jelas semua waktu yang diskenariokan Pak Cholil dan kawan-kawan termasuk panja haji, semua tanggal sudah terlewati, artinya hari ini tinggal tanggal 31 Mei. Sementara kuota terkecil 1,8% itu maksimal tanggal 28 Mei.

Nah oleh karena itu mungkin hari ini kita para anggota atau dari meja Pimpinan, konsentrasinya kesana tentang pelaksanaan sehingga tadi kita berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk ketemu Pak Presiden itu membawa hasil daripada rapat kerja ini lengkap dan valid sehingga keputusannya keputusan pemerintah bersama DPR.

Oleh karena itu kami persilakan kepada seluruh anggota berdasarkan fraksi sama seperti biasa waktunya lima menit, kalau lebih mungkin saya akan ingatkan. Kami persilakan dari Fraksi PDIP siapa? Ada PDIP yang hadir? Atau dari virtual ada PDIP? Oh ntar dulu berarti yang di fisik dulu ya, yang hadir dulu, dari Golkar? Pak HBA ya, Hasan Basri Agus, mantan Gubernur Jambi, yang menang Pak Haris ya Pak ya? Kadang-kadang, iya, selanjutnya nanti dari Gerindra siapa? Pak Jefry? Ini alumni gontor ini, qolqolahnya ngeri. Dari Demokrat? Pak Achmad, kegiatan terus di Riau ini, masih lama Pemilu Pak, luar biasa ini Pak Achmad ini. Dari PKB? Pak Kyai Maman ya, oh *sorry* dari Nasdem? Ini kebalik-balik saya ini, Nasdem siapa? Ibu Lisda ya. Tadi Pak Achmad sudah, PKS? Biasanya PKS hadir ini, tidak ada, mungkin dari virtual nanti coba tanya satu, dari PAN tadi Pak Asli Chaidir minta Pak Rizal dari virtual dia WA saya, tolong nanti siapkan sekretariat Pak Asli Chaidir secara virtual dari Padang ini atau gatau darimana. Terakhir dari PPP ada? Belum ya, tolong Bu Diah dari PDIP siapa. Kita lanjutkan dulu kami persilakan Pak Hasan Basri Agus dari Golkar

**F-P. GOLKAR (Drs. H. HASAN BASRI AGUS, M.M.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Ibu Wakil Ketua, rekan-rekan Anggota Komisi VIII

Yang saya hormati Bapak Menteri, para asisten I, maksud saya eselon I dan para staf hadirin sekalian yang berbahagia.



Dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi kami bersyukur sekali rinci sekali Bapak Menteri menyampaikan terutama kaitannya dengan rencana keberangkatan haji tahun ini.

Kalau melihat sebagaimana kata Pak Ketua Komisi tadi, tanggal yang direncanakan oleh Pak Menteri saya pikir supaya gak ragu itu kita mengambil sikap Pak Menteri, kalau memang ya tidak mungkin ya sudah putuskan gitu bahwa kita tahun ini tidak memberangkatkan jamaah haji kita ke Arab Saudi. Saya pikir begitu, jangan masyarakat di terutama dibawah ragu-ragu macam-macam gitu penilaiin terhadap kita.

Saya tadi membaca Facebook mengatakan bahwa salah satu penyebab pemerintah Saudi Arabia tidak memasukkan Indonesia karena kita berutang gitu, karena uang kita dipakai untuk pembangunan, itu kan mungkin *hoax* ya saya tidak tau itu, ada tadi dalam Facebook Pak Menteri.

Jadi oleh sebab itu memang ini perlu betul kita *clear* kalau memang ya tidak memungkinkan lagi saya pikir kita harus putuskan kita tahun ini kita tunda saja pemberangkatan haji ini. Saya pikir begitu mungkin jangan menyusahkan kita sebab dari target yang disampaikan Pak Menteri tadi sudah selesai, gak mungkin lagi kita untuk mempersiapkan itu. Itu pertama Pak Menteri.

Kemudian yang kedua, termasuk juga tadi sampai persiapan andaikata pemberangkatan masalah Covid, pemberangkatan sampai pulangny kita atur sedemikian rupa, saya rasa ini tidak ada lagi kelemahan kita saya pikir dari sisi persiapan menghadapi itu.

Kemudian yang kedua, saya ingin menanggapi tentang undang-undang tentang masalah pendidikan Pak kaitannya dengan Ma'had Aly gitu, berdirinya rencana kita membuat perguruan tinggi Ma'had Aly ini pada dasarnya kekhawatiran para ulama berkurangnya ulama-ulama kita yang pandai membaca kitab kuning, itu awalnya pemikiran awalnya. Oleh sebab itu kedepan kami mengharapkan Pak Menteri masalah pendirian Ma'had Aly ini harus betul-betul diperketat, jangan nanti jangan semuanya dapat kesempatan untuk mendirikan, ini akhirnya kualitasnya kembali seperti IAIN, cukuplah UIN atau IAIN saja gitu seperti yang sudah sudah. Jadi Ma'had Aly ini betul-betul kalau tidak salah 13 Ma'had Aly Pak ya yang sudah diizinkan Pak Menteri.

Kaitannya memang nanti kalau tamatan Ma'had Aly kalau ahli Fiqih misalnya jurusan Fiqih dia ahli betul bidang unsur Fiqh, kalau perlu kaidah-kaidah unsur Fiqh itu dia paham dan hapal gitu, termasuk juga mungkin bidang tafsir juga jadi semuanya harus ahli betul kalau bisa hapal diluar kepala. Jadi memang tamatan Ma'had Aly itu betul-betul kualitasnya nanti kita harapkan luar biasa.

Kami terus terang di Jambi ada satu yang direstui Pak Menteri Agama sebelumnya Ma'had Aly ini, memang ya muridnya tidak banyak Pak Menteri dan seleksinya juga ketat, paling-paling kadang-kadang 1 tahun 20 ada 15 tapi gak apa-apa, tetapi memang mereka yang tamat dari itu betul-betul kualitasnya yang kita harapkan luar biasa gitu. Bukan berarti hanya sekedar pandai membaca kitab kuning, tetapi juga ahli di bidang Fiqih kemudian

(suara rekaman tidak jelas) itu yang harus kita harapkan dari tamatan Ma'had Aly ini. Itu pertama.

Kemudian yang kedua, masalah tadi Bapak akan mendirikan KUA revitalisasi KUA, kami mengharapkan saran kami Pak Menteri kalau bisa KUA percontohan itu didirikan setiap provinsi, jangan sampai nanti masing-masing provinsi pergi belajar ke pulau Jawa ini atau studi banding kesini, kan biayanya juga berkurang. Jadi setiap provinsi dijadikan KUA yang revitalisasi oleh Pak Menteri, jadi ini KUA percontohan. Ini yang kami lihat dari yang tercatat disini ya ini hanya sebagian dari di Jawa saja, tidak di setiap provinsi. Jadi nanti biayanya murah, KUA yang ada di kabupaten dalam proses dia membenahkan dirinya ya cukup studi banding di KUA yang ada di provinsi saja.

Kemudian yang terakhir kami ingin menanggapi tentang tanah memang ini yang dikeluhkan di lapangan, tanah menjadi yang milih pemda baik itu provinsi dan kabupaten, kami *insyallah* sebagai dapil Golkar di Jambi nanti sebagai Anggota DPR Komisi VIII akan mencoba melakukan pendekatan ke kepala daerah yang bersangkutan agar bermurah hati untuk menyerahkan tanah KUA yang berada di wilayahnya masing-masing diserahkan kepada Departemen Agama. Sebagaimana juga dulu saya juga waktu jadi gubernur saya gak segan-segan Pak menteri, menteri agama dulu minta asrama haji tanah saya serahkan, kemudian UIN juga minta tanah saya serahkan, ngapain, yang diserahkan kepada negara juga. Jadi kalau ada kepala daerah yang mungkin keberatan itu mungkin sangat keliru sekali, itu nanti perlu kita sampaikan kepada yang bersangkutan.

Kami rasa hanya itu dulu dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaat untuk kepentingan agama dan kebersamaan kita di komisi VIII ini.

Terima kasih.

*wallahul muwaffiq ila aqwamithaariq.*

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Waalikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Makasih Pak Hasan Basri Agus atau lebih populer HBA dari Golkar. Kami lanjutkan dari PDIP, Arwan Aras secara virtual, nyambung gak? Oke, oke lanjut kami persilakan Gerindra Pak Jefry Romdonny.

#### **F-P. GERINDRA (Dr. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, dan juga Gus Menteri beserta jajarannya.

Memperhatikan uraian Pak Menteri terkait persiapan haji yang finalisasinya menunggu alokasi kuota dari Kerajaan Saudi Arabia juga memperhatikan tenggat waktu maksimal pemberian kuota dari semua skenario yang sudah terlampaui tenggatnya sebagaimana tadi tabel yang dilampirkan. Dan juga memperhatikan sisa waktu pemberangkatan kloter yang semakin pendek.

Nah menurut Pak Menteri ini, skenario kuota berapa persen yang bisa kita laksanakan? Kemudian kriteria jamaah yang bisa masuk ini seperti apa? Atau ada kemungkinan terburuk kita tidak dapat kuota sama sekali. Saya mungkin memohon penjelasan dari Pak Menteri terkait ini dan juga terkait dengan pemberitaan yang menyatakan bahwasanya Indonesia masih termasuk yang dilarang masuk ke Arab Saudi, saya khawatir ini juga merupakan sinyal kuat. Juga dengan memperhatikan tenggat waktu kuota yang sudah terlampaui, besar kemungkinan kita tidak diberikan kuota haji tahun 2020, *naudzubillahindzalik*, semoga tidak terjadi.

Bagaimana tanggapan Kementerian Agama soal ini dan juga apa tindakan dan *lobby* Kemenag agar Indonesia bisa masuk ke dalam yang dibolehkan dan setidaknya mendapatkan kuota minimal 10%.

Kemudian terkait dengan hal lainnya ini saya menyoroti mengenai mushaf Al-Quran ya dimana ini merupakan kebutuhan pokok yang wajib ada dan tersedia secara proporsional layaknya beras atau sembako untuk kebutuhan jasmani. Untuk ketersediaan dan juga pemenuhan mushaf Al-Quran ini tentu Kemenag ini harus jadi 'bulog' nya mushaf, dan pemenuhan mushaf ini cenderung lebih mudah daripada pemenuhan beras atau sembako yang diproduksi dari barang hidup yang tergantung pada iklim, mushaf ini produk manufaktur, produk pabrikaan yang bisa diproduksi sebanyak-banyaknya dan dapat diproduksi di musim hujan maupun musim kemarau.

Hemat saya, target produksi satu juta mushaf untuk negara yang penduduk muslimnya ini sekitar 200 jutaan adalah target terendah yang harus dapat disediakan pemerintah kepada mayoritas rakyatnya. Kondisi ketersediaan mushaf yang hanya 300.000 ini saya nyatakan sebagai darurat nasional mushaf Al-Quran yang berbahaya bagi kelangsungan hidup dan moral bangsa Indonesia. Jadi saya dukung upaya Kementerian Agama untuk target satu juta mushaf dengan dukungan dan APBN, PNPB, dan juga nilai manfaat dana haji.

Kemudian mengenai KUA yang merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan umat yang keberadaannya dan fasilitasnya harus profesional dan memadai, juga salah satu atau mungkin satu-satunya sumber PNPB Kemenag, saya mencatat di dapil saya ini ada lahannya sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten, tapi sampai sekarang itu belum dibangun, juga malahan ada KUA yang terusir, mohon segera ada tindak lanjut dari Kementerian Agama untuk pembangunan KUA ini yang sudah mendapatkan lahan dari pemerintah kabupaten khususnya di dapil saya Sumedang, Majalengka, Subang. Saya dukung 100% KUA yang profesional dan fasilitasnya memadai.

Kemudian berikutnya terkait dengan rampungnya tiga peraturan Menteri Agama sebagai pelaksanaan undang-undang tentang pesantren walaupun sudah lewat dari tenggat waktu yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu satu tahun setelah diundangkan, sekali lagi saya sangat apresiasi *better later than never*. Saya ingin mengingatkan saja bahwasannya ada beberapa peraturan Menteri Agama yang harus diundangkan seperti mutu pesantren kemudian juga tentang pendidik dan tenaga pendidik pesantren dan juga peraturan presiden tentang sumber pendanaan pesantren, saya yakin beberapa peraturan pelaksanaan tersebut akan segera diundangkan.

Pak Menteri yang juga pernah menjadi Anggota DPR pastinya mafhum sering lambat dan lalainya pemerintah dalam menyusun mengundang peraturan pelaksana undang-undang yang menjadi domain pemerintah karenanya saya yakin Pak Menteri akan *aware*.

Kemudian ini yang terakhir banyak aduan kepada saya tapi bukan hanya dari dapil saja tapi dari juga yang lain-lain, ini terkait dengan seleksi calon mahasiswa baru Al-Azhar Cairo yang tahun ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan hanya meloloskan 1000an lebih mahasiswa baru dari total pendaftar 5000an. Banyak aspirasi dan pertanyaan kepada saya, jadi saya ingin meminta penjelasan kepada Pak Menteri terkait hal tersebut, pertama saya ingin menanyakan dasar seleksi ini, jika untuk kuota beasiswa yang hanya 20 calon mahasiswa baru ini dilakukan seleksi saya mungkin mafhum. Tapi untuk yang biaya mandiri ini dasarnya apa, kalau Pak Wamen atau pejabat Kementerian Agama lainnya mungkin mafhum karena pernah menguliahkan putra-putrinya ke Universitas di luar negeri, tapi kalau saya dengan Pak Menteri mungkin anak-anaknya belum ada yang kuliah ya barangkali Pak Menteri.

Jadi ada yang memang itu biaya mandiri itu dia bisa langsung ikut tesnya di luar negeri tanpa harus ikut seleksi di kemendikbud, jadi langsung daftar ke universitas yang dituju. Nah ini kok di kementerian agama harus ada seleksi dulu ya. Dan juga pertanyaan terkait ini, kalau yang lolos dari kemenag ini apakah langsung diterima di Al-Azhar dan juga bagaimana nasib calon mahasiswa baru ini yang tidak lolos seleksi Kemenag, apakah tidak bisa mendaftar lagi langsung di Al-Azhar, dan juga ini bagaimana ini kuotanya kan saya lihat ini ada yang untuk NU, Muhammadiyah, gontor, dan juga lembaga lainnya.

Demikian mungkin yang saya tanyakan pada kesempatan ini, terima kasih Pimpinan.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Waalaiikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Makasih Pak Jefry Romdonny dari Gerindra. Kami persilakan dari Nasdem Ibu Hj. Lisda.

**F-P. NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, SE., MM. Tr.):**

Baik Pimpinan terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII.

Yang saya hormati Menteri Agama dan juga seluruh jajaran yang hadir.

*Alhamdulillah* senang sekali Pak Menteri terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa sudah sangat lengkap walaupun kami terus terang hari ini hadir berharapnya ada berita bahagia ya walaupun kita mengetahui bahwa kondisinya harus kita maklumi seperti ini. Namun demikian di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri beserta seluruh jajaran atas segala upaya yang sudah dilakukan mewakili masyarakat Indonesia untuk menyelenggarakan atau mempersiapkan pemberangkatan haji ini mulai dari skenario yang disiapkan mulai dari 100%, 50 sampai dengan 1,8% pun kita sudah siapkan dan mengenai vaksin yang *alhamdulillah* juga sudah mencapai target artinya seluruh jamaah kita memang sudah disiapkan untuk pemberangkatan.

Namun demikian sampai hari ini memang kita nyatanya belum mendapatkan kepastian itu, di penghujung hari ini Pak Menteri kadang-kadang disaat kita sudah pasrah Pak sudah pasrah sudah tidak rasa-rasanya sudah tidak mungkin ada pertolongan Allah untuk kita semua. Namun demikian sebagai manusia tentu kita berharap Pak Menteri setelah rapat ini dapat menemui presiden dan ini adalah yang terakhir mungkin ya upaya dari kita sebagai bangsa Indonesia untuk tetap dapat bisa memberangkatkan jamaah haji dari Indonesia.

Kemudian untuk yang kedua Pak Menteri saya juga mengucapkan terima kasih untuk pengangkatan dari guru-guru honorer kita yang jumlahnya ini sebanyak 9495 PPPK dan guru madrasah dan juga 27.303 PPPK guru pendidikan agama, yang artinya di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini walaupun dibicarakan dengan harapan, harapannya itu masih jauh lebih banyak sebenarnya. Tapi dengan kondisi pandemi sekarang ini kami patut mengapresiasi dan berterima kasih juga kita bersyukur bersama masih tetap ada guru-guru kita yang bisa diangkat pada tahun ini.

Walaupun disini saya juga akan menyampaikan usulan, ada dua usulan dari perkumpulan guru inpassing nasional Pak, yang pertama usulannya adalah mereka menyatakan bahwa belum adanya kuota PPPK bagi guru madrasah, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran yang mereka mengajar di madrasah. Yang kedua, masa kerja inpassing yang sampai saat ini belum direalisasikan, padahal pada tanggal 6 Agustus 2018 disampaikan kalau masa kerja inpassing akan dihitung setelah empat tahun diberlakukannya PMN ya 43 Tahun 2014 berarti pada tahun 2019 seharusnya sudah dihitung dalam pembayarannya namun sampai saat ini belum sama sekali, ini yang mereka sampaikan melalui saya.

Kemudian yang selebihnya Pak Menteri walaupun sudah pernah saya sampaikan, saya mau mengulanginya kembali apa yang saya perhatikan bahwa memang rekrutmen daripada baik itu karyawan umum ya maupun juga pengajar ini memang kita ini masih sangat carut marut, jadi artinya saya berharap dibawah kepemimpinan Pak Menteri kedepannya khususnya di Kementerian Agama penerimaan daripada karyawan ini betul-betul sebenarnya maunya lewat jalur yang mana, mau lewat honorer atau langsung? Kalau honorer artinya mereka direkrut masuk honorer itu kan punya kriteria juga tidak asal asal masuk saja gitu. Kemudian setelah dari sana baru kemudian mereka menuju kepada pengangkatan. Nah selama menjadi honorer itu disitulah yang kita bina kita beri pelatihan-pelatihan maksimal sehingga pada saat mereka menjadi pegawai negeri atau pengangkatan tadi mereka sudah benar-benar menjadi yang benar-benar yang terbaik. Atau mau langsung Pak, abis sekolah langsung mendaftar gitu ya, jadi jangan seperti sekarang ini yang sudah honor 20 tahun Pak tiba-tiba yang baru masuk sudah masuk aja gitu. Artinya kalau dibicarakan masalah kualitas masalah segalamacam apa yang tidak bisa sih kalau kita kasih pembekalan kepada orang-orang yang sudah honorer tersebut.

Begitu juga dengan mempersiapkan tenaga pengajar dari universitas yang menyediakan. Kalau saya melihat kemarin kita ada kunjungan kerja ke daerah Jawa Barat atau Bogor ya, itu dia menambah fakultas yang nanti dia akan mengeluarkan tenaga pengajar, jadi ditambah terus, padahal setelah itu mereka mau kemana. Jadi kalau harusnya menurut saya kalau misalnya kita menerima setahun itu hanya 1000 orang ya kita cetaklah 1000 orang, walaupun dilebihkan ya buat cadangan saja gitu ya, kecuali kalau kita punya program misalnya dilebihkan 200 orang tetapi 200 ini yang akan kita didik untuk kita misalnya dikirim ke luar negeri, nah seperti itu. Jadi jangan terus dicetak dicetak dicetak tapi setelah itu mau dikemanakan seperti itu. Mungkin demikian Pak masukan dari saya. Terima kasih.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Bu Lisda dari Nasdem. Kami lanjutkan kepada Fraksi PKB, kami persilakan Pak Kyai Maman.

#### **F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):**

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII, Menteri Agama beserta seluruh jajaran.

Yang pertama sebenarnya faktor komunikasi ini menjadi sangat penting Pak Menteri terutama kepada publik tentang kejelasan berangkat atau tidak. Kalau seandainya dipastikan bahwa kita tidak berangkat itu sebenarnya

sudah lebih menarik daripada istilah orang sunda mah *diganggayong* gitu, orang masih berharap ingin berangkat tetapi gak berangkat.

Yang kedua, publik pun harus mendapat penjelasan kalau tahun ini kita tidak berangkat ini adalah sebuah keputusan yang demi kepentingan jamaah itu sendiri soal kesehatan, soal keselamatan jiwa dan lain sebagainya ini yang perlu didapatkan. Jadi berita *hoax* yang tadi disebutkan Pak Gubernur tadi itu sudah dibantah Pak Gubernur, *hoax-hoax* itu saya dengan teman-teman BPKH membuat video-video bantahan karena *hoax* itu terlalu masif seolah-olah kita gak bisa berangkat hanya karena tidak ada uangnya dan lain sebagainya, itu salah itu *hoax*. Jadi perlu dijelaskan Pak Gus Menteri bahwa keselamatan jiwa itu menjadi sangat penting.

Nah selanjutnya komunikasi pun perlu untuk selalu bicara dengan pemerintah Arab Saudi yang memang standar Arab Saudi sekarang levelnya dinaikkan. Misalnya umrah tidak masuk di urusan haji tapi di pariwisata. Kalau pariwisata, maka itu sudah urusannya dengan standar internasional dan ini yang tentu harus dipahami juga oleh masyarakat kita. Makanya saya tadi mendengar ada panduan manasik haji saat pandemi sebaiknya gak perlu itu cetak buku itu karena hajinya pun gak ada, yang perlu itu adalah membuat aplikasi yang bisa dipakai oleh para jamaah bagaimana dia melakukan haji dan simulasi. Saya misalnya keliling ke beberapa daerah orang sekarang sudah gak mau baca buku kok, sekarang orang lebih baik misalnya melakukan ada aplikasi berangkat haji dan sebagainya, saya yakin Gus Menteri punya pengalaman waktu di Anshor punya teknologi untuk aplikasi haji itu dan itu lebih penting.

Jadi kita harus berpikir lebih konstruktif kepada Arab Saudi ... kita berbicara dengan Arab Saudi dengan keinginan dia sampai 2030 itu *high level* banget Pak, dia ingin ninggalin semua negara-negara dan lain sebagainya. Itu yang pertama.

Yang kedua soal Covid, *alhamdulillah* ada kemajuan yang konstruktif, dulu saya pernah mengkritik zamannya Pak Fakhru Rozi bahwa Kementerian Agama ini tidak punya *sense of covid*, seolah-olah itu bagiannya Kementerian lain, padahal posisinya lebih penting lagi ada penyuluh-penyuluh yang sampai ke daerah-daerah khotib-khotib di semua daerah itu betul-betul ngomong soal bahaya covid itu masih di depan mata, saya terkejut tadi malam menghadiri sebuah acara peresmian masjid dimana orang sudah gak ada covid perasaanya, maka saya takut sekali Pak Yandri bagaimana kejadian di India gairah keagamaan akhirnya orang kena covid seperti itu.

Jadi saya minta Pak Menteri untuk mengaktifkan seluruh jajaran penyuluhan dengan dalil-dalil keagamaanya bahwa covid ini masih ada di depan kita dan gelombang keempat seperti di India dan beberapa tempat masih akan sangat terjadi.

Nah lalu selanjutnya saya minta bantuan ke pasantren itu menjadi sangat penting, saya mohon Pimpinan Komisi VIII juga memfasilitasi komunikasi kita dengan beberapa kementerian lain bahwa kementerian agama itu kadang-kadang dianaktirikan bapak-bapak, di BOS dan lain sebagainya, jadi kita memang punya komitmen Komisi VIII ini untuk

mendukung Kementerian Agama ini bahwa pesantren itu bagian terpenting dari pendidikan nasional, seperti itu.

Waktu kemarin saya mengkritik Risma soal 21 data ganda, sampai hari ini dia gak bisa jawab apa-apa, nah jangan sampai lalu apa yang ditakutkan oleh orang yang dilakukan Kemensos itu tiba-tiba diterapkan ganda ke kementerian agama, misalnya penerima bansos di pesantren harus lapor dulu dan lain sebagainya, tolong beri kemudahan pesantren terutama Pak Menteri, penyediaan sanitasi, masker, hari ini kita sudah mulai masuk pesantren. Yang daftar di tempat saya lebih diluar dugaan itu dibanding pesantren lain itu meningkat dan orang ingin cepat-cepat masuk pesantren, ini perlu kita fasilitasi.

Nah yang selanjutnya UPK, saya rasa Kementerian Agama harus ikut standar Arab Saudi aja soal penulisannya soal waqof dan sebagainya karena itu Gus Baha misalnya berkali-kali bilang itu yang internasionalisasi standar Quran itu penting, tapi saya setuju Pak Jefry yang terpenting itu adalah bagaimana gerakan wakaf Quran itu betul-betul dikoordinir oleh Kementerian Agama, kita sedih saja ada badan wakaf nasional, ada baznas, tapi gak efektif itu, kayak baznas aja tolong Pak Menteri ditegur aja itu baznas itu leletnya minta ampun dapat dana dari BPKH itu gak jelas banget gak profesional, kalah sama laz-laz yang lain, ini padahal baznas lagi.

Nah lalu distribusi Quran nya itu berdasarkan data daerah mana yang membutuhkan, jadi jangan sampai ada sebuah daerah yang dapat wakaf habis-habisan sementara kita datang ke Papua, ke NTT dan sebagainya atau beberapa pesantren di tempat saya aja kesulitan dapat Al-Quran yang bagus, makanya terima kasih Pak Yandri kemarin kita dapat Quran dari Kementerian Agama itu berapa tumpuk itu wah itu sekalian untuk THR para kyai.

Yang terakhir, ini usulan aja Pak Menteri, revitalisasi KUA *mbo* ya KUA nya yang ada di dapil kami dong, misalnya di dapil kami itu ada Pak siapa di dapil kami itu ada tiga orang bayangkan Pak, maka disebut kok gak ada Banjarnegara lagi ini lagi dan sebagainya, jangan-jangan itu dapil Pak Menteri yang akan datang kan bahaya juga Pak. Jadi tolong dapil-dapil yang ada di Komisi VIII itu perlu ada percontohan. Jadi kalau Pak Gubernur ngusulin tiap provinsi kebanyakan Pak lebih baik kita yang ada dapilnya aja.

Oke terus bekerja dan yakinkan ke publik bahwa Kementerian Agama telah melakukan upaya yang sistematis untuk kemungkinan-kemungkinan terbesar dan Komisi VIII akan sangat mendukung.

Terima kasih.

*wallahul muwaffiq ila aqwamithaariq.*

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*



Makasih Kyai Maman dari PKB. Kami lanjutkan ke Demokrat, silakan Pak H. Achmad.

**F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):**

Makasih Pimpinan

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan beserta Anggota yang saya hormati termasuk yang virtual, Bapak Menteri beserta seluruh jajaran.

Pertama kami menyampaikan terima kasih atas ekspos penjelasan Pak Menteri. Tapi rasanya kita hari ini berbual-bual ini Pak Ketua, rasa berbuang-buang aja kita ini cerita masalah haji. Selama kami di daerah Pak, terkesan pemerintah Indonesia ini, maaf, tidak peduli dengan persiapan haji, itu yang kami dapat kesannya, artinya abai gitu, 95% 90% ini umat muslim tapi terkesan ini seolah adem-adem aja sebagaimana menyambung Pak Menteri, maksud saya bukan melemahkan Pak Menteri, kami kita tidak lagi zamannya tidak lagi sekarang saatnya Menteri Agama dengan urusan haji yang berurusan, tapi sudah harus kepala pemerintahan ini, Pak Jokowi harus turun tangan ini Pak mengontak Raja Salman, jadi nampakkan kepedulian pemerintah ini terhadap masalah keagamaan kita ini, ini perlu Pak karena terkesan masyarakat kita sekarang pemerintah ini kurang serius karena berlindung dibalik covid, justru semakin tantangan yang kita hadapi untuk haji ini semakin nampak beraninya pemerintah harusnya seperti itu Pak, bukan dengan covid ini kita lalu bermain dibalik itu.

Jadi saran kami untuk Pak Menteri cobalah presiden kita bicara di formal gitu di media gitu bahwa haji ini kita urus kita apa walaupun itu teknis sudah tapi ini perlu Pak demi nama baik Pak Menteri di tengah masyarakat, demi nama kepala daerah pemerintahan.

Jadi kami maksudkan kalau ini sudah selesai Pak Menteri kami acungkan jempol bagus, tapi ini komitmen Pak Jokowi Pak yang penting, ini demi bangsa negara kita. Jangan ada isu-isu tambahan, ini yang kita dengar dibawah, ada isu macam-macam lah itu, maka pemerintah Indonesia masuk 20 negara yang ditolak kemudian keluar lagi 10 negara kita masih juga. Jadi untuk meng-clear kan itu, kami cinta, sebetulnya pemerintah kita ini cinta dengan Pak Jokowi tapi justru itu harus itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, masalah ini Pak, guru ini saya total tadi 32.422 yang diprogram P3. Ini sebetulnya kalau dikaitkan dengan pendidikan agama khususnya agama islam ini kan 90% Pak pendidikan agama itu diurus oleh rakyat kita, hanya 10% kita urus, nah kenapa Menteri Pendidikan Diknas bisa mengusulkan satu juta program P3 ini, kenapa kita hanya 32 ribu Pak? Ini sangat ironis sekali. Nah kami Komisi VIII mendukung kalau Bapak Menteri mengusulkan 500 ribu kami siap hari ini kita perjuangkan ke Menteri Keuangan Pak, jadi tidak hanya 32 ribu pak, harus maksimal kita Pak target harus maksimal. Jadi dengan 32 ribu tidak masuk akal dengan satu juta ini,

toh itu putra putri kita juga toh itu uang negara sama hak mereka pendidikan agama ini.

Jadi kami ngusul Pak Menteri kalau bisa nanti di perubahan anggaran ini usulkan lagi Pak Menteri dari 32 ribu ini mungkin 100 ribu atau 200 ribu gitu, jadi nampak greget kita untuk bantu, karena 90% ini proses pendidikan ini ditanggung oleh rakyat kita, toh berbagi kita guru-guru ya mungkin pemerintah alangkah baik cantiknya.

Jadi kami sarankan ini untuk pendidikan agama ini ditambah Pak lagi prosentase ini tidak hanya 32 ribu tapi lebih daripada itu karena kita mengacu satu juta kok ada uangnya gitu, satu juta ada guru umum kok guru agama gak ada uang, kan gitu kesannya, padahal belum tentu begitu pemerintah ini, itu yang kedua.

Yang ketiga masalah penguatan (suara rekaman tidak jelas) agama melalui kompetensi penceramah. Ini juga Pak jangan sampai menimbulkan persoalan, apalagi ada sertifikat ini, nanti kami khawatir nanti dibawah ini kamu ustadz sertifikat saya tidak, itu akan terjadi blok Pak. Pernah waktu Pak Sarifudin udah membuat ini tapi heboh jadinya, jadi maksudnya hati-hati kita membuat kebijakan ini jangan terjadi blok-blok dai-dai kita ulama-ulama kita di daerah apalagi ini nanti KUA yang mengatur nanti misalnya sholat ied, sholat (suara rekaman tidak jelas) nanti bisa saja yang sertifikat boleh melaksanakan sholat ied, yang tidak sertifikat tidak, ini akan bermuara kesana nanti pak. Jadi kami khawatir ya program-program seperti ini kita kaji betul lah Pak kita survei betul kebawah seperti reaksinya, dan kemudian pun kalau ini dilaksanakan jangan kementerian yang melaksanakan, kita suruh yang melaksanakan kompetensinya Majelis Ulama Indonesia, MUI ini yang bertandatangan ini, jadi kalau ada heboh ada apa MUI yang menangani, bukan kita langsung terlibat disitu, ini saran saya seperti itu karena kompetensi keilmuan itu ada pada MUI.

Jadi saya khawatirnya nanti yang menandatangani sertifikat itu ilmunya yang sertifikat itu lebih tinggi, jadi siapa yang tandatangan nanti. Jadi nanti ini coba lah dikaji ulang lagi, maksud kita baik tetapi jangan sampai kubu-kubuan ditengah masyarakat ditengah umat kita ini ustadz Buya, kyai sertifikat ini tidak, ini boleh ceramah ini tidak, ini boleh khatib ini tidak, akan seperti itu nanti kedepan, ini untukantisipasi, itu yang ketiga.

Yang keempat masalah mashaf Pak, kami bukan apa tapi kami perhatikan di masjid mushaf-mushaf itu Quran itu tak tersentuh di masjid-masjid, orang lebih pakai HP ini, jadi kalau kita cetak pun orang lebih suka ini apalagi anak-anak milenial kan, ini kan sudah cukup semua disini sehingga artinya tafsirnya dan segalamacam nya masalah IT ini apalagi milenial, jarang menggunakan itu. Jadi kalau kita cetakpun banyak-banyak rasanya untuk ke masyarakat itu juga mubazir, kami bukan menentang ustadz, tidak, tapi sekarang dengan IT ini kenapa tidak IT ini yang kita kejar, toh sasaran kita kan milenial kan 70%, jangan kita lagi secara konvensional mushaf ini, ini sudah ada semua disini Pak lengkap hadis semua lengkap disini, kenapa juga itu kita anu, lebih baik kita saya setuju (suara rekaman tidak jelas) itu dimanfaatkan Pak artinya masyarakat itu yang didorong untuk wakaf-wakaf Al-Quran tapi jangan program pemerintah, itu yang ketiga.

Yang keempat terkait dengan tes internet, tes mahasiswa ke timur tengah Pak, ini kita belum sistem tapi kita sudah melaksanakan sistem IT. Anak-anak diinformasikan pakai laptop yang 7 tau-tau pakai 8, sehingga anak-anak kita yang tes itu belum masuk ke sistem itu karena padatnya mungkin masuknya orang yang tes itu sehingga mereka tidak bisa ujian Pak, jadi banyak yang korban gara-gara sistem yang tidak pas sehingga banyak calon mahasiswa kita yang mau ke timur tengah tidak bisa ikut tes padahal mereka mampu. Jadi kami harap kepada Dirjen Pendis ini berilah seluas-luasnya kepada anak-anak kita untuk belajar ke timur tengah toh mereka mandiri, mereka mandiri Pak tidak pakai uang pemerintah, pokoknya asal diizinkan Menteri Agama kami berangkat, dari sisi ekonomi kami mampu, nah kenapa kita tidak beri peluang ini, jangan kita batas sistem mereka itu dengan tes, jadi ini saya kira semakin banyak intelektual agama semakin hebat negara bangsa kita ini.

Jadi beri kebebasan Pak, jangan karena sistem jangan karena ada badan yang mengelolanya, ini badan ini kadang-kadang membatasi orang untuk ikut tes itu sehingga korban anak-anak kita tahun ini banyak yang korban tidak bisa masuk ke sistem itu karena padatnya jalur waktu itu, jadi mungkin sistem di dalam tes mahasiswa ini perlu diperbaiki kedepan ini sehingga anak-anak kita yang calon mahasiswa tidak korban.

Terakhir yaitu balitbang, balitbang kami kemarin sudah jadi katanya 2021 ini tapi tanda-tanda jadi itu belum ada Pak, infrastruktur sudah tanah sudah ruangan sudah segalamacam sudah, saya lacak kemarin di sekneg sudah ... untuk kelembagaan itu sudah. Jadi kami mohon Pak Menteri dalam rangka peningkatan SDM kitam balitbang Riau itu tolong direalisasikan tahun 2021 ini mudah-mudahan 100 ribu Pak gak mungkin kita bergabung ke Padang, kapan meningkatkan SDM kita yang ujung tombak seperti penyuluh segala macam itu.

Jadi tolong balitbang ini untuk Riau yang sudah siap infrastruktur semua sudah siap hanya menunggu operasional dari Kementerian dan itupun di anggaran kemarin sudah dianggarkan kalau gak salah. Jadi tolong Pak 2021 ini.

Terakhir kami setuju mendukung kalau KUA contoh itu Pak setiap kami dapat di dapil kami, jadi kami ada disini. Jadi kami kira itu Pak Menteri. Terima kasih

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Achmad, dapil Pak Achmad ini Riau ya? Tapi kalau dapilnya Pak Maman ini ada beberapa anggota itu, tiga ya? Tapi bagus juga itu Pak Menteri misalkan peresmian pertama representasi dapil Banten II itu Ketua berarti itu, kalau mungkin ya kan gitu loh kalau mungkin.

Baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang PDIP ya silakan Ibu Selly, Ibu Hj. Selly, suaranya.

**F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Menteri

**KETUA RAPAT:**

Ini dimana Bu di kebun pisang atau dimana ini Bu?

**F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Ya?

**KETUA RAPAT:**

Atau dibelakang pohon korma?

**F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Di rumah, bisa ya Pimpinan?

**KETUA RAPAT:**

Lanjut Bu

**F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Dilanjut ya, oke.

Yang saya Hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi VIII.

Pertama saya mengapresiasi apa yang sudah disampaikan Gus Menteri mengenai lobi-lobi terhadap pemerintah Saudi Arabia. Tetepi kalau kita berbicara kebijakan, kita berbicara langkah, maka sudah pasti urgensi kepastian pemberangkatan haji inilah yang ditunggu-tunggu oleh para jamaah haji termasuk kita yang ada di DPR karena kepastian inilah yang akan menentukan apakah BIPIH ini akan kita tindaklanjuti atau tidak.

Kemudian informasi haji yang selama ini beredar di luar kaitan dengan pembatasan haji, kita mendapatkan informasi sudah ada beberapa negara dengan *list* kuota yang sudah ditentukan. Nah ini bagaimana dengan Indonesia.

Kemudian kita mengetahui kontribusi pemerintahan Indonesia terhadap Arab Saudi kan tidak bisa dibilang abal-abalan karena memang jamaah

Indonesia ini adalah jamaah terbesar sehingga tentu akan mempengaruhi ekonomi yang ada di Saudi Arabia.

Nah mengenai kepastian waktu ini tentu saja tidak bisa dalam waktu lama tapi harus dalam waktu secepatnya dan saya mengapresiasi apabila dalam waktu satu dua hari kedepan kita sudah bisa memutuskan apakah akan memberangkatkan atau tidak, apabila memang akhirnya kuota haji ini ada maka tentu ada PR berikutnya yang harus dilakukan dalam waktu marathon oleh Komisi VIII beserta Kementerian Agama khususnya Dirjen PHU menentukan BIPIH berapa yang harus ditentukan kemudian kita juga masih punya kendala mengenai vaksin seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan bahkan sisa waktunya ini berapa lama apakah memungkinkan kita menggunakan vaksin yang sudah direkomendasikan oleh Saudi Arabia dan tentunya ini bukan hal sepele dan membutuhkan waktu yang secepatnya.

Kemudian apabila tidak teratasi atau dalam artian kita tidak bisa memberangkatkan, maka tentu saja pemberangkatan haji 2021 harus dibatalkan. Nah pada saat kita membatalkan ini tentu kita membutuhkan penyampaian narasi yang sangat baik kepada para jamaah dan khususnya rakyat Indonesia karena penyampaian itu dibutuhkan secara lengkap secara tuntas. Nah khusus menyangkut dengan pemberangkatan ini saya masih agak mempertanyakan kembali kepada Kementerian Agama apabila kita memang tidak akan memberangkatkan, sudah sejauh mana pembicaraan dari Dirjen PHU khususnya Kementerian Agama kepada Pemerintah Arab Saudi, jangan sampai kejadian tahun 2020 kita tetap harus membayar *charge* kepada terhadap proses pemberangkatan haji karena memang sudah ada beberapa mata anggaran yang dibelanjakan oleh Kementerian Agama seperti halnya pencetakan buku haji kemudian gelang.

Nah menyangkut hal seperti ini, saya harapkan Pimpinan agar di tahun 2021 kita meminta kepada Kementerian Agama agar secara gamblang menyampaikan kepada kita sudah berapa banyak uang yang melalui APBD atau APBN mengenai DIPA ini dipergunakan oleh Kementerian Agama, nah ini khusus mengenai haji.

Kemudian yang berikutnya yang menjadi catatan saya, saya mengapresiasi mengenai undang-undang pesantren karena memang dahil saya Cirebon Cirebon Indramayu pesantrennya sangat banyak dan ini sudah sangat ditunggu-tunggu tentunya mengenai undang-undang pesantren kita ketahui di dalam klausulnya dua tahun setelah diundang-undangkan artinya Oktober 2019 akan berakhir di Oktober 2021, tinggal sisa waktu beberapa bulan ini kalau apabila Kementerian Agama tidak memiliki turunan dalam bentuk PP atau PMA nya saya yang saya takutkan akan ada sanksi hukum dan apabila sudah ada seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama, saya mengapresiasi bersyukur sekali kalau draf tersebut bisa di-*sounding* kemudian disampaikan kepada Komisi VIII dan kalau perlu Pimpinan kita membuat tim khusus antara Komisi VIII dengan Kementerian Agama untuk menyerap aspirasi publik mengenai transparansi rencana draf modul khusus untuk turunan dari undang-undang pesantren, artinya kita bisa melakukan uji publik antara tim yang dibentuk Kementerian Agama dengan Komisi VIII menyangkut dengan Undang-Undang Pesantren.

Kemudian saya bersyukur sekali bahwa apa yang menjadi harapan saya selamaini mengenai UPQ percetakan Al-Quran mendapatkan perhatian yang sangat besar dari Kementerian Agama, kita sudah mendorong dari tahun kemarin, yang membuat saya sedih adalah pada saat kita datang ke UPQ yang memang milik kita hanya bisa mencetak 200-300 karena memang peralatan dan mesinnya sudah sangat ketinggalan zaman padahal pada tahun 2019 kita menganggarkan satu juta mushaf Al-Quran dan akhirnya baru bisa terpenuhi sekitar tahun berikutnya, artinya kalau anggaran rasanya APBN sangat memungkinkan untuk memberikan mencetak sebanyak-banyaknya, tapi kan yang menjadi kendala kemampuan UPQ tadi, dan kalau Pak Menteri mempunyai keinginan untuk melakukan revitalisasi, Komisi VIII saya yakin akan mendorong itu, tetapi mohon maaf Pimpinan saya ingin bahwa revitalisasi tetapi UPQ tersebut bisa menjadi episentrum sejarah mushaf Al-Quran Indonesia karena kalau tidak dibarengi dengan itu, sangat disayangkan hanya sekedar percetakan tetapi kalau UPQ punya fungsi lain yaitu fungsi pendidikan islamnya juga ada kemudian fungsi sosialnya ada saya rasa ini bisa menjadi satu unit yang memang bisa memberikan nilai maslahat yang sangat besar untuk negara dan bangsa kita.

Kemudian yang menjadi catatan saya adalah kalau memang UPQ nanti disetujui oleh Komisi VIII dan Kementerian Agama bisa juga berbicara tentang sejarah Mushaf Al-Quran mohon nanti akan ada pengembangan untuk wisata budaya dan pendidikan islam di UPQ tadi.

Yang terakhir mungkin yang menjadi catatan saya menyangkut dengan KUA Pimpinan, saya mendukung sekali agar revitalisasi KUA ini segera dilakukan oleh Kementerian Agama. Tetapi ada dua hal yang harus menjadi sorotan kita, revitalisasi bukan hanya sekedar revitalisasi infrastruktur bangunan tetapi ada juga revitalisasi mengenai struktur seperti halnya digitalisasi KUA, kita baca Gus Menteri bahwa setiap tahun selalu Kementerian Agama mendapatkan tanda merah dalam pelayanan KUA dan itu menjadi pr kita, kenapa? Dianggap bahwa oleh Ombudsman pelayanan ini terlalu banyak pungli, maka dengan digitalisasi yang dilakukan di KUA ini saya yakin ke depan ini bisa mengatasi rapat merah yang dikeluarkan oleh Ombudsman karena ada transparansi kemudian hal-hal yang menyangkut ketidakpastian data itu bisa dituntaskan termasuk *cost and benefit* yang dihasilkan dari KUA tadi.

Dan saya juga mengapresiasi sertifikasi nikah yang dilakukan oleh Gus Menteri yang nanti mungkin akan ter-*connect* di KUA kalau memang kita akan melakukan digitalisasi. Tetapi satu hal Pimpinan, jangan sampai digitalisasi tadi tidak ter-*connect* dengan dukcapil yang ada di Kementerian Dalam Negeri karena kalau kita sudah punya integrasi maka di integrasikan lah dengan Kementerian Dalam Negeri tadi agar ketahuan berapa banyak penduduk Indonesia yang sudah teregistrasi menikah dan belum atau mungkin sudah bercerai. Nah ini akan gampang juga buat kita menentukan berapa banyak janda yang dihasilkan setiap tahunnya.

Terakhir juga mungkin dengan adanya digitalisasi ini harapan saya bahwa KUA bukan hanya sekedar pelayanan tetapi ada PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dihasilkan oleh KUA saya minta kepada Pimpinan agar PNB yang dihasilkan oleh KUA perlu mendapatkan perhatian Komisi

VIII kepada Kementerian Keuangan agar bisa seluruhnya dikembalikan kepada Kementerian Agama dalam artian KUA karena selama ini semua yang dihasilkan disetorkan tetapi pada saat akan menggunakan itu hanya dibatasi sekitar 80% artinya kita menghasilkan tetapi pemanfaatannya tidak sebesar yang kita hasilkan, padahal ada juga

**KETUA RAPAT:**

Ya bisa dipersingkat Bu.

**F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Ya ini terakhir. Yang terakhir itu bahwa seperti halnya imigrasi, kantor imigrasi juga melakukan PNPB tapi dia bisa 100% kembalikan kepada imigrasi sehingga kantor-kantor imigrasi ini kan besar-besar. Tetapi kenapa justru yang memberikan pelayanan seperti KUA, Kementerian Keuangan hanya memberikan 80%. Nah ini menurut saya kedepan rasanya kita perlu melakukan rapat kerja khusus dengan Kementerian Agama menyangkut dengan digitalisasi publik khusus mengenai KUA atau mungkin digitalisasi di Kementerian Agama. Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Tadi Bu Diah minta Bu Sri berdiri dulu katanya, sekarang jangan. Ya makasih sekali Bu Selly tapi saya agak kurang setuju tadi Pak Menteri yang dilaporkan Bu Selly kalau data-data janda itu terlalu di-*publish* Pak walaupun *connect* sama Dukcapil ya itu agak disembunyikan dikit lah jangan terlalu di-*publish*.

Baik kita lanjutkan ke penanya berikutnya Pak Kyai Bukhori, gak biasanya nih virtual ini, silakan Pak Kyai.

**F-PKS (K.H. BUKHORI, Lc., MA.):**

Baik terima kasih Pak Ketua.

Pak Ketua dan Anggota yang saya hormati.  
Pak Menteri dan seluruh jajaran saya hormati.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera

Selamat sore bagi kita semuanya

Mohon maaf saya bicara melalui virtual dan tadi ketika kami masuk juga putus sambung putus sambung tetapi saya juga sudah membaca bahannya.

Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi ... apa yang semua yang sudah dilaksanakan dilakukan diupayakan oleh menteri dalam berbagai aspeknya terutama upaya-upaya untuk melakukan pemberdayaan terhadap pesantren dan pendidikan agama dan itu memang merupakan tupoksi.

Saya ingin masuk dari filosofi besar bahwa negara kita ini negara berdasar ketuhanan yang maha esa. Karena itu sudah sepatutnya Kementerian Agama ini adalah mampu menjadi terdepan menjiwai dan mewarnai dalam seluruh aspek kehidupan tantangan sehingga tercipta sebuah satu kehidupan yang kondusif yang sesuai dengan tatanan ketuhanan.

Nah karena itu, pertama saya ingin memberikan tanggapan terkait dengan upaya untuk kepastian keberangkatan haji 2021. Ini juga merupakan satu upaya yang harus lebih serius dilakukan. Kami tentu tetap mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini menteri maupun presiden terkait dengan upaya-upaya diplomasi yang lebih *equal*, lebih berkualitas dan bermartabat dalam kaitannya terkait dengan haji, karena banyak persoalan selain persoalan masalah diri kita atau Indonesia taspennya belum dicabut sebagaimana ketetapan terbaru bahwa ada 11 negara yang sudah diperkenankan sejak tanggal 30 Juni atau Mei kemarin untuk bisa berkunjung ke Arab Saudi baik melalui Umrah maupun lainnya yang itu kemudian tentunya Indonesia tidak masuk.

Yang kedua juga terkait masalah vaksin, ini juga serius, jadi saya kira kami minta penjelasan apa sih yang sudah dilakukan secara detail diplomasi oleh pemerintah Indonesia terkait dengan masalah haji agar kepastian makin jelas, karena itu yang paling ditunggu.

Yang kedua terkait dengan unit percetakan Al-Quran saya juga pernah hadir kesana dan sangat disayangkan masih ada beberapa mesin yang kemudian (suara rekaman tidak jelas) dan kemudian sifatnya sewa padahal kebutuhan masyarakat kita terhadap Al-Quran setiap tahunnya diperkirakan akan mencapai 2 juta, tetapi yang mampi dicetak hanya 900 ribu dan bahkan kemudian saya lihat di rencananya hanya ada 350 ribu, saya kira ini terlalu jauh. Ini menyangkut terkait dengan masalah negara berdasar (suara rekaman tidak jelas) karena itu pemenuhan kebutuhan Al-Quran ini kemudian harus diperhatikan betul.

Yang ketiga terkait dengan pendidikan agama, kami beberapa hari yang lalu baru ketemu dengan beberapa pejabat daerah dari Kementerian Agama, mereka mengeluhkan tentang jumlah guru agama yang masih sangat jauh berkurang. Guru Agama yang berstatus mereka mengajar berada di sekolah-sekolah umum maupun kemudian mereka ada mengajar dibawah sekolah-sekolah negeri itu sendiri. Ini kemudian guru agama kurang, apalagi ketika diukur dengan PPPK ini saya melihat bahwa Kementerian Agama belum begitu serius untuk mengusahakan agar (suara rekaman tidak jelas) atau (suara rekaman tidak jelas) kuota terhadap masalah PPPK yang jumlahnya masih cukup besar tidak dimanfaatkan begitu serius. Saya melihat



belum adanya sebuah satu lobi-lobi yang kuat, lobi-lobi yang sangat bisa mendesak kepada pemerintah tentang kebutuhan keperluan ini padahal guru kita begitu sangat banyak sekali, guru agama dan bahkan misalnya dalam prakteknya guru yang sudah ditetapkan oleh PPPK yang tempo hari saya sampaikan yang mereka dikasih SK oleh pemerintah oleh diknas yang mereka mengajar di sekolah negeri lalu kemudian mereka sudah dikasih diknas lalu kemudian ketika mereka disamakan yang sudah bekerja atau mengajar 15 tahun di-nol-kan, ini juga saya kira merendahkan terhadap Kementerian Agama itu sendiri kepada tenaga-tenaga guru kita. Harusnya mereka dihargai sebagaimana yang lain juga.

Kemudian yang berikutnya terkait dengan masalah KUA, saya kira ini perlu memang KUA ini harus kemudian direvitalisasi, saya setuju dengan gagasan Gus Menteri terkait dengan revitalisasi KUA. Nah revitalisasi KUA selain kemudian terkait dengan menyempurnakan terhadap infrastruktur dan infrastruktur terhadap mereka terhadap KUA-KUA di kita, karena KUA ini sebenarnya etalase Kementerian Agama di tingkat paling bawah, bentuk pelayanan paling riil disana, tetapi kemudian juga harus ada peningkatan sumber daya manusianya.

Nah karena itu salah satu peningkatan sumber daya manusia selain meningkatkan *capacity building* mereka maka perlu pemenuhan terhadap mereka penyuluh-penyuluh agama ini mesti harus dipenuhi. Kalau kemudian polisi saja bisa memenuhi setiap desa, setiap kota, atau setiap kelurahan itu satu polisi, kenapa guru agama satu setiap desa tidak ada, kenapa kemudian setiap kecamatan itu cuma hanya dicetak 8 orang padahal jumlah desa atau jumlah kelurahan di setiap kecamatan itu macam-macam ada yang sampai 20, ada 24, tapi kemudian penyuluh agamanya hanya 8 orang, ini sangat penting sekali karena ini terkait dengan masa depan umat dalam konteks beragama.

Nah salah satu bentuk yang perlu dijadikan bentuk revitalisasi oleh KUA adalah jadikanlah KUA ini sebagai tempat untuk berdialog, tidak hanya sekedar untuk melayani perkawinan tetapi dialog menjembatani berbagai macam perbedaan-perbedaan masyarakat, jangan sampai isu-isu yang kemudian berpotensi memecah belah terhadap anak bangsa ini baik terkait tuduhan agama tertentu terkait aliran tertentu ini harus diselesaikan di KUA, dialog, nah dengan adanya banyak dialog maka kemudian akan tercipta suatu kehidupan yang kondusif, kehidupan yang semakin dewasa mematangkan, jadi tidak hanya sekedar revitalisasi dalam konteks bangunannya, tetapi sumber daya dan suprastrukturnya kemudian diperkuat.

Yang terakhir Pak Menteri bahwa sekali lagi kami mendukung terhadap upaya-upaya perbaikan dalam konteks pendidikan, sekali lagi, beberapa kali saya katakan seharusnya kita sebagai Menteri Agama kalau kita lihat misalnya 'jembreg' data sekolah agama dalam hal ini misalnya mulai ibtidaiyah sampai kemudian aliyah lalu SD sampai kemudian SMA maka sesungguhnya kalau kita lihat apakah bahwa anggaran pendidikan yang 20% itu kita sudah mendapatkan hak kita atau belum. Jadi kalau belum saya kira Kementerian Agama harus segera kemudian memberikan kepada kami *blueprint* dan proposal yang lengkap karena ini merupakan tuntutan anak bangsa, jangan sampai kemudian

**KETUA RAPAT:**

Bisa dipersingkat Pak Bukhori

**F-PKS (K.H. BUKHORI, Lc., MA.):**

Oleh Kementerian Agama jauh kemudian lebih rendah

**KETUA RAPAT:**

Pak Bukhori bisa dipersingkat?

**F-PKS (K.H. BUKHORI, Lc., MA.):**

Meskipun, terima kasih Pak, meskipun kemudian saya juga ucapkan selamat atas tercapainya MAN Incen atau MAN Insan Cendikia yang kemudian menjadi juara 2, tetapi ini satu, jadi saya kira harus ditingkatkan semuanya.

Bapak Ibu sekalian saya kira itu Pak Menteri mudah-mudahan berguna. Saya mohon maaf kalau nanti seandainya tidak muncul karena kemudian saya sedang menunggu pesawat untuk kemudian bisa *landing*. Terima kasih.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Baik terima kasih Kyai Bukhori dari PKS. Kami lanjutkan Pak Asli Chaidir dari PAN.

**F-PAN (H. MHD. ASLI CHAIDIR, S.H.):**

Makasih Ketua

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI  
Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran.

Pada kesempatan yang baik dalam rangka membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal saja.

Pertama, mungkin semuanya dari para peserta rapat, pertanyaan pertama sekali akan sama-sama semua tapi ini adalah karena aspirasi dari daerah dapil masing-masing.

Pertama terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji ini, masyarakat para calon jemaah haji menunggu mengenai kesiapan kepastian diadakan atau tidak penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini. Masyarakat berharap dan cemas tahun lalu kita tidak memberangkatkan calon jemaah haji dan di tahun ini ada kecemasan yang sangat besar di kalangan masyarakat, kejadian di tahun lalu akan terulang kembali, sangat besar harapan kita dan juga para calon jemaah haji di tahun ini kita bisa memberangkatkan calon jemaah haji untuk menunaikan kewajiban ibadah haji.

Namun tentunya hal ini sangat bergantung kepada keputusan pemerintah Arab Saudi. Untuk itu mohon disampaikan mengenai batas waktu kita menunggu kepastiannya penyelenggaraan ibadah haji.

Dari paparan yang disampaikan Kementerian Agama masih belum ada kepastian sampai hari kapan dan kapan itu dapat kepastian tentang kuota haji di negara Indonesia.

Yang kedua, jika ada penyelenggaraan ibadah haji, saran dan rekomendasi saya selaku wakil dari calon jemaah haji Sumatera Barat agar tidak ada kegiatan pelunasan bagi calon jemaah haji karena pelunasan memakan waktu yang cukup lama, sekitar satu bulan, waktunya sangat tidak mendukung dikarenakan sangat singkat dengan waktu yang penyelenggaraan ibadah haji. Jadi jika ada peningkatan biaya haji itu BIPIH agar tidak dibebankan kepada jemaah sehingga tidak ada lagi kegiatan pelunasan ulang dari nilai manfaat kekurangan haji dari hasil investasi BIPIH dan BIPIH tahun yang lalu yang tidak jadi diberangkatkan dari *virtual account*. Jadi ini karena memang mengingat waktu yang sangat pendek.

Yang ketiga, ini kalau juga jadi diberangkatkan untuk biar semacam rekomendasi nanti jangan pada waktu akan mau jadi dapat berangkat kita baru segera menyelesaikan masalah ini. Untuk biaya koper jemaah dan biaya transportasi dari asrama haji ke bandara yang belum ter-cover oleh maskapai penerbangan seperti usulan PT. Garuda Indonesia, untuk tahun ini sebaiknya dikembalikan lagi ke pihak maskapai penerbangan, biayanya disesuaikan atau ditambah dan disatukan kepada biaya komponen penerbangan sebab jika dilakukan pengadaan oleh pihak Kementerian Agama atau Kementerian Agama Provinsi waktu yang tidak akan mencukupi.

Terakhir untuk vaksinasi, jika kemudian pihak Arab Saudi mewajibkan mereka tentu untuk jenis vaksin yang diakui, sebaiknya calon jemaah haji dilakukan vaksin lagi oleh pihak Kementerian Kesehatan dan biaya diambil dari BIPIH atau dari APBN, dari APBN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, syukur-syukur jika Arab Saudi kemudian mengizinkan atau mengakui vaksin Sinovac yang telah dilakukan langkah-langkah seperti yang dibutuhkan. Sementara itu saja Ketua. Terima kasih.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Baik terima kasih dari semua fraksi sudah, dari yang fisik masih ada yang mau bicara, Pak Rudi? Pak Rizal? Oh iya Pak Arwan yang virtual satu ya, Pak Soleh? Ya silakan Pak Rudi dari Nasdem.

## **F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):**

Makasih Ketua.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

Yang saya hormati Pak Menteri, Wakil, Sekjen, Dirjen dan jajaran.

Pak Menteri, saya hanya sedikit saja, saya banyak mendapat pertanyaan ketika kunjungan dan reses tentang jamaah haji kita ini gitu. Banyak berita banyak mereka menanyakan dan kesimpangsiuran begitu jadi selain masyarakat ini bertanya sebenarnya Pak Rudi jadi gak jamaah dari Indonesia ini berangkat, nah itu rata-rata Pak pertanyaannya. Bukan sekali dua kali bukan satu dua orang tapi banyak Pak berulang dan berhari-hari.

Jadi yang ingin saya tanyakan dan saya sudah baca dan saya sudah dengar kaji juga banyak masukan, sesungguhnya keadaan kita ini kan Pak kalau dair berita terakhir itu termasuk negara yang di-*blacklist* Pak ya artinya yang dibolehkan itu hanya 11 atau berapa gitu.

Jadi saya ingin mengingatkan Pak Menteri dan Dirjen PHU kiranya kedepan kita harus berterus terang Pak harus mengumumkan kepada masyarakat calon jamaah agar dijelaskan bahwasanya begini loh kita ini hanya diberi kuota misalnya 5000 misalnya kalau Bapak mau sampaikan itu, atau kita ini di-*blacklist* jujur Pak gitu. Jadi masyarakat ini calon jamaah atau yang jamaah yang sudah menunggu sampai puluhan tahun ini tidak berharap Pak. Saya ada juga yang dibilang Pak Rudi gak PHP katanya, saya bilang apa PHP, dirjen PHU yang ada saya bilang, apa saya bilang, dia bilang Pak Rudi cerita saja jangan pemberi harapan palsu katanya Pak, nah itu. Makanya saya ingatnya Dirjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) kan Pak, jangan nanti kita dipleset plesetkan gitu Pak jadi tukang PHP. Banyak yang seperti itu bertanya begitu.

Jadi kita harus jujur Pak, kita harus cerita realita bahwasanya kerajaan Saudi dia sudah mengkaji melihat ya kan Pak dengan orang-orangnya disini mungkin tidak mengizinkan Pak, kita juga harus jujur kepada masyarakat rakyat yang kita Pimpin yang Bapak wakili yang kami wakili gitu. Itu Pak yang paling utama gitu, jangan nanti Pak Dirjen ini kan sering bahas ini Pak Menteri, semangat ini Pak Dirjen ini saya lihat semangat dibanding dirjen yang lalu, ilmunya tinggi kayaknya ini, kalau bebek berenang kalah Pak, ilmunya gitu.

Maksud saya harus ya ayo Pak ceritakan apa adanya gitu dengan koordinasi Pak Menteri kan gitu, jangan PHP-PHP gitu, kami kan habis cerita

dengan Pak Dirjen bahas kasih lagi semangat dengan jamaah kayaknya ada, kayaknya gitu kan, terakhirnya kan hanya itu tadi dia Pak seminggu kemudian kita dengar dari kabar dari Arab atau dari berita dilarang, itu maka kita dibilang PHP kami Pak, saya gak bilang Pak Menteri Pak Dirjen ya, gitu.

Itu saya pikir yang utama dan saya ngingatkan lagi Pak Menteri baiknya kita juga fokus kepada penggunaan anggaran kedepan Pak, contoh anggaran PHU-nya itu contoh anggaran-anggaran lain Pak di dirjen lain Pak bagaimana Pak tinggal ini sudah masuk ke bulan enam, sudah enam bulan. Jadi tinggal enam bulan, kalau anggaran bulan 12 itu tidak efektif lagi Pak gitu, jadi tinggal lima bulan Pak penyerapan anggaran itu Pak, itu yang harus fokus Pak harusnya kalau penyelenggaraan haji tolong umumkan saja begitu dengan kondisi yang kuota mereka katanya 50 ribu seluruh dunia artinya Indonesia berapa Pak sampaikan saja Pak apakah 10% 5% nya gitu kan. Jadi masyarakat yang cerdas atau travel-travel itu bisa mendefinisikan ah ini udah gak ada harapan gitu, mereka tidak PHP sama jamaah. Itu saya pikir Pak Menteri dan jajaran. Saya kembalikan ke Ketua.

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Masih ada? Pak Rizal? Ya.

#### **F-PAN (H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si):**

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati.  
Bapak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati.

Saya sedikit menambahkan tadi sudah banyak yang kami dapatkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Menteri dan juga Ketua, sebenarnya kalau saya lihat isu mengenai haji ini sudah lama, sudah lama sekali banyak yang mengatakan misalnya kita sudah gak punya uang lagi karena tidak bisa bayar pondokan dan lain sebagainya.

Nah sebenarnya ini harusnya sudah diantisipasi Pak Menteri, saya ingin menanyakan sebenarnya sejak isu-isu itu sudah berjalan sejak lama mungkin sebelum puasa juga sudah banyak isu-isu itu, kira-kira upaya apa upaya diplomasi yang dilakukan oleh Pak Menteri kepada Pihak Kerajaan Arab Saudi karena ini sangat penting kalau misalnya hanya menunggu saja saya kira memang agak sulit kita padahal masyarakat sudah menunggu sejak lama kapan apakah mereka berangkat atau tidak dalam melaksanakan haji ini, jadi sudah lama ini sejak satu tahun yang lalu. Sementara ini sudah akhir-akhir kalau saya lihat urutan tadi yang disampaikan Pak Menteri memang sudah gak mungkin lagi kita untuk melaksanakan ibadah haji ini atau hanya 10% atau memang seharusnya memang sejak awal ini sudah dilakukan

bukan hanya Pak Menteri yang melakukan, mungkin presiden kita yang melakukan pendekatan kepada Kerajaan Arab Saudi sehingga bukan menjadi alasan saya kira kalau misalnya sudah akhir-akhir ini kita seolah-olah tidak mampu lagi karena alasan pandemi ini. Itu saya kira yang pertama.

Kemudian yang kedua, ada istilah penguatan moderasi beragama melalui kompetensi penceramah. Saya kira ini tolong hati-hati Pak Menteri karena ini kadang-kadang ada label penceramah yang mendapatkan sertifikat dan yang tidak mendapatkan sertifikat, saya kira ini mungkin perlu berhati-hati kita melakukan pendidikan ini sehingga tidak ada perbedaan antara penceramah yang hasil pendidikan dari Kementerian Agama ataupun dari yang lain-lain gitu, saya kira memang penceramah kita banyak dimana-mana dan ini saya kira ini seharusnya menjadi perhatian Pak Menteri sehingga tidak terjadi perpecahan diantara kita sesama para penceramah. Saya kira itu.

Kemudian yang ketiga, ada saya dapat informasi Pak Menteri ada dosen di Kopertis 9 itu yang belum mendapatkan honor sertifikasi dosen sejak bulan Juli 2020 dan sampai sekarang, itu kira-kira apa masalahnya? Itu saya kira pertanyaan, dan ini diajukan kepada kita kira-kira masalahnya dimana apakah memang tidak ada dana lagi atau memang itu sudah dihentikan?

Itu saya kira Pak Menteri sebagai tambahan, terima kasih Pak Ketua saya kembalikan.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Rizal dari Fraksi PAN.

**F-P. NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, SE., MM. Tr.):**

Izin Pimpinan, satu menit, setengah menit.

**KETUA RAPAT:**

Kami lanjutkan, Pak Saleh dulu.

**F-P. GOLKAR (MOHAMMAD SALEH, S.E.):**

Baik terima kasih.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta seluruh Anggota. Gus Menteri dan seluruh jajarannya.

Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yang pertama berkenaan dengan haji. Nah berkenaan dengan haji ini berangkat dan tidak berangkat sebenarnya juga mesti ada satu langkah strategis yang mesti diambil oleh kementerian, karena apa? Kalau berangkat, pasti jumlahnya tidak akan sesuai dengan kuota yang selama ini.

Nah tentu kalau melihat dengan berita yang berkembang sekarang hanya 60 ribu kita bisa bayangkan jamaah haji Indonesia hanya berapa berangkatnya. Nah oleh karena itu perlu segera dibuatkan langkah-langkah strategis untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami tidak berangkat ini karena hal seperti bla bla bla sehingga tidak terjadi gejolak ataupun reaksi-reaksi yang negatif di tengah-tengah masyarakat.

Jadi saya pikir berangkat dan tidak berangkat itu juga tetap harus ada langkah strategis yang sudah mulai disusun mulai saat ini, nah seperti tahun lalu kan kita ada mensosialisasikan melalui kantor-kantor agama di setiap provinsi. Nah jadi ini juga sudah mesti dipersiapkan mulai saat ini.

Nah yang kedua, berkenaan juga saya mengusulkan sudah mesti dianggarkan untuk beasiswa-beasiswa di pendidikan islam Pak karena pasti sebentar lagi juga orang di sekolah-sekolah umum juga pasti sudah menyusun anggaran untuk itu. Nah saya berharap di Kementerian Agama juga menyusun anggaran beasiswa bagi siswa-siswa atau mahasiswa di pendidikan Islam.

Nah yang ketiga, soal kesejahteraan tenaga penyuluh di daerah-daerah karena ini merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama, nah saya kebetulan beberapa waktu lalu bekerja sama dengan ustadz ustadz di daerah, saya membuat satu program pelatihan bagi para penceramah atau khotib di daerah-daerah terpencil karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kualitas khotib di daerah terpencil itu sangat jauh dari harapan kita dan ini luput dari penglihatan kita. Nah oleh karena itu saya harap juga Gus Menteri melalui kantor agama di setiap daerah untuk mengevaluasi posisi itu karena ini kan tidak begitu sulit, nah saya melalui apa yang saya bisa sudah mulai melakukan *training* melalui pelatihan khotib-khotib di daerah-daerah terpencil.

Nah kemudian ada satu lagi Pak Gus Menteri, saya baru pulang dari dapil sekalian saja saya menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan di daerah. Di tempat saya itu di Kabupaten Rejang Lebong baru berdiri sebuah pesantren Da'arul Ma'arif mereka berharap Gus Menteri yang meresmikannya.

Itu saja Pak, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, saya sangat berharap Gus Menteri bisa datang ke Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu untuk meresmikan pesantren tersebut.

Demikian Terima Kasih.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamithaariq*

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Saleh, Rejang Lebong itu jauh Pak, dari Bengkulu berapa jam itu jalannya kelok-kelok kan, kecuali kalau disiapkan helikopter sama orang sana itu, enggak, maksud saya kalau Serang lebih dekat lah kalau Pak Menteri mau datang.

Baik kita kembali ke laptop ini, Pak Arwan Aras silakan dari PDIP Sulbar.

## **F-PDIP (H. ARWAN M. ARAS T., S. Kom.):**

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII dan Wakil Pimpinan Komisi VIII.

Yang saya hormati rekan-rekan Anggota Komisi VIII yang hadir secara fisik maupun secara virtual.

Yang saya hormati Menteri Agama dan seluruh jajaran yang ada.

Baik, info yang disampaikan Pak Menteri hari ini, kerajaan Arab Saudi belum juga memberikan kepastian kuota jamaah haji. Namun menurut saya info yang hampir kita dapatkan setiap ... dengan Kementerian maupun dengan sekjen PHU bahwa kita sedang menunggu, hampir seragam semua pertanyaannya kita, kenapa tidak ada kepastian sampai hari ini, mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Menteri kemudian juga ada Pak Dirjen PHU bahwa dalam waktu ini apa saja yang sudah dilakukan ini sehingga kata-kata menunggu itu kita bisa maknailah bahwa kita gak bekerja, walaupun bekerja apa yang sudah dilakukan sampai hari ini.

Kemudian ternyata ada skema yang keenam lagi ini, 1,8, nah saya ingin bertanya juga 1,8% ini bagaimana Pak kalau kita jawabannya lagi menunggu kuota dari Arab Saudi, saya jujur ingin sekali mendengar Pak Menteri dengan Sekjen PHU ini apa sih yang sudah betul-betul kita lakukan sehingga pemerintah Arab Saudi ini mendengar apa yang sudah kita sampaikan kesana dan apa yang sudah kita lakukan dengan pemerintah Republik Indonesia. Itu yang pertama.

Yang kedua Pak, kita juga baru saja mendengar mendapatkan info yang 20 negara yang di-*suspend* itu 11 negara sudah bisa masuk negara Arab Saudi, 9 negara ini belum ada pemberitahuan selanjutnya apa bisa masuk atau tidak. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Menteri kita-kira bagaimana caranya supaya 9 negara ini terkhusus Indonesia agar bisa masuk lah, *suspend*-nya bisa dilepas lah.

Ketiga mengenai perekrutan PPPK, kita tau sendiri Pak kita di Kementerian Agama ini hanya sepertinya setengah hati dalam mengusulkan PPPK ini, 27.303 orang, ketika kita bandingkan dengan Kemendiknas itu jauh sekali Pak itu ada di angka 1 juta PPPK, saya juga melihat bagaimana ya lobi dari Kementerian Agama ini kepada pemerintah ini agar perbandingannya agak sedikit ... minimal kita di angka sekian ini kalau perbandingannya seperti



ini Pak sangat jauh sekali sementara kita ketahui guru-guru agama yang ada di daerah kita masing-masing contoh agama islam itu kadang-kadang di sekolah-sekolah umum itu malah yang mendidik ustadz atau imam masjid, teman-teman kita yang kristen itu malah diajarkan sama pendeta-pendeta, ini sangat kontra dengan apa yang diinginkan kita di Komisi VIII dengan apa yang diinginkan Kementerian Agama yang hanya Cuma meminta 27.300 sekian.

Nah kemudian yang keempat ini Pak revitalisasi 100 KUA. Nah, kira kira Pak Menteri ini kriterianya apa saja ini sehingga 100 itu kan kalau 100 itu ya tentu kebanyakan paling dalam kota lagi, kota-kota besar, nah bagaimana dengan yang di daerah-daerah terutama daerah-daerah yang mengalami bencana. Saya sejak 2020 sudah mengusulkan Pak beberapa KUA di dapil saya sampai hari ini belum ada jawaban, nah sekarang itu terdampak bencana Pak Menteri, saya berharap saya juga mendapatkan informasi dari Pak Menteri kira-kira bagaimana penyelesaian KUA yang terdampak bencana ini. Mungkin itu saja Pimpinan. Terima kasih.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Tapi hebat juga ini Pak Arwan Aras ini ngasih tugas Pak Menteri mencabut *dispend* itu pelarangan terbang ke Saudi itu bagaimana itu Pak Menteri. Ya lanjut Pak, tadi ada Bu Lisda mau ngomong lagi dikit?

**F-P. NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, SE., MM. Tr.):**

Sedikit Ketua izin.

**F-P. GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Pak Wachid

**F-P. NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, SE., MM. Tr.):**

Oh Pak Wachid? Sedikit ya Ketua, Pak Menteri mungkin tadi kan ada temen kita yang menanyakan tentang

**KETUA RAPAT:**

Atau sebentar saya perpanjang dulu waktu ya, sebentar Bu Lisda sampai jam 16.00.

**(RAPAT: SETUJU)**

**F-P. NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, SE., MM. Tr.):**

Ya, untuk sertifikasi daripada ustadz-ustadz tadi ya Pak Menteri terus terang kami pengen penjelasan lebih detail sebenarnya dalam proses itu apa saja itu artinya kegiatan itu apa saja supaya kami juga memahami supaya jangan kita misalnya menolak tapi kita sendiri tidak tau sebenarnya apa sih disitu yang lengkap detail tujuan daripada Kementerian Agama, karena kalau kita melihat di lapangan memang harus ada kita memastikan bahwa tidak ada ajaran-ajaran yang salah kemudian juga saya sendiri pernah mendengar beberapa kali ustadz yang mengajarkan aduh tidak pantaslah diucapkan oleh seorang ustadz di masjid misalnya seperti itu termasuk wawasan bela negara mungkin pancasila, kemudian bhineka tunggal ika dan sebagainya. Tentu kami berharap ada detail daripada Kementerian Agama sebenarnya apa saja sih yang diberikan materi-materinya sehingga mungkin itu juga bisa kita dukung bersama kalau memang itu adalah yang *insyallah* terbaik. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, tambahan dari Bu Lisda itu ya. Terakhir, silakan Pak Wachid dari Gerindra.

**F-P. GERINDRA (ABDUL WACHID):**

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang kami hormati rekan-rekan Pimpinan dan Wakil Pimpinan serta Anggota Komisi VIII.

Yang kami hormati Pak Menteri bersama Pak Dirjen dan jajarannya.

Mohon maaf sebenarnya saya tadi itu abis subuh mau berangkat ke Jakarta sudah janji sama Pak Ketua, namun di Kudus di Jepara di Demak ini Covid sedang tinggi bahkan ini ada 15 dokter yang kena terpapar banyak yang terpapar sehingga kami gak bisa berangkat ke Jakarta.

Pak Menteri, terkait dengan masalah haji sebenarnya ini sinyal ini sudah kami sampaikan pada waktu sebelum puasa ya bahwa diantaranya persoalan masalah vaksin ya, vaksin ini Sinovac ini kami mohon kementerian atau pemerintah untuk terutama dari Kementerian Kesehatan untuk bagaimana realisasi vaksin Sinovac ini sudah diterima WHO atau belum, nah ini sebenarnya ini yang sudah kami sampaikan sudah waktu itu. Saya sampaikan bahwa kita kena dampak geopolitik antara Amerika dan China kan begitu.

Nah ini terus terangnya Pak Menteri tadi penjelasannya kami mengikuti sebaiknya sekarang ini waktunya kita menjelaskan mumpung kita duduk bersama antara Pak Menteri dengan kita DPR, kalau kita ini menuju kepada harapan lagi kan waktunya *deadline*-nya tanggal 28 kita ini, ini sudah

kayaknya sudah gak mungkin waktunya tanggalnya sudah lewat, sebaiknya sekarang ini bagaimana kita merumuskan memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa jamaah haji atau keberangkatan haji tahun 2021 ini menyampaikan bla bla bla atau mohon maaf karena masyarakat terkait dengan persoalan macam macam lah masalah vaksin masalah covid masih melanda di negeri kita masih tinggi cukup tinggi sehingga diamati oleh WHO karena Arab Saudi memakai pedoman WHO bahwa Indonesia masih tinggi covidnya sehingga tidak diperbolehkan masuk ini biar ada kejelasan yang jelas ya.

Ini sebaiknya itu seperti itu, jadi tidak usah memberikan satu nunggu menunggu atau memberikan tadi sampaikan siapa tadi yang menyampaikan 'php' ya itu saya kira sudah tidak perlu lagi. Sebaiknya kita terbuka merumuskan bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat untuk masalah haji tahun 2021 ini belum bisa dilaksanakan.

Yang kedua, kita sebaiknya sekarang ini bagaimana menjelaskan bagaimana kita ini menyangkut masalah kaitan dana haji kaitannya dengan BPKH terkait dengan masalah nilai manfaat yang tidak dipakai ini bagaimana kelanjutannya untuk apa ini sudah dua kali 2020 dan 2021.

Saya kira itu jadi memang ini terus terangnya waktu itu saya sampaikan sebelum puasa itu kami punya teman-teman disana Pak Menteri bahwa terkait dengan lobi Arab Saudi itu sangat penting, nah ini mestinya ini juga mesti dipertanyakan dubes kita yang disana dubes kita itu perannya seperti apa lobinya kepada pemerintah Arab Saudi sehingga sampai ini gagal, ini juga perlu dipertanyakan jadi lobi-lobinya dubes terhadap karena beliau punya kuasa penuh di Arab Saudi ya beliau harus juga ini kenapa gagal gitu, ini seperti itu.

Jadi begitu Pimpinan saya kira untuk ini sebaiknya kita harus ada penjelasan khusus karena ini ditunggu oleh masyarakat kaitannya dengan masalah berangkat atau tidaknya masalah haji tahun 2021. Terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamithaariq*

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Wachid. Kami kembali ke meja Pimpinan, mulai Pak Mukhlas? Cukup? Pak Ace?

#### **F-P. GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI VIII:**

Ya terima kasih.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Ibu Wakil Ketua, Para Anggota, Pak Gus Menteri, dan Jajaran Eselon I Kementerian Agama yang kami hormati.

Pertama, ya sebetulnya kita juga sulit ya untuk bisa memastikan karena sepenuhnya kewenangan itu ada di pemerintah kerajaan Arab Saudi, dan dua hari lalu kita mendengarkan kabar bahwa 11 negara yang diperbolehkan untuk masuk ke Arab Saudi dengan kriteria yang sebenarnya juga sumir gitu kalau melihat pendekatannya ya kalau mau jujur misalnya Amerika, kalau dilihat dari penanganan Covidnya juga gak bagus bagus amat dibandingkan dengan Indonesia gitu, bahkan menurut keterangan WHO Amerika juga paling buruk gitu.

Kemudian, jadi menurut saya tidak, kalau yang dijadikan sebagai ukurannya itu penanganan covid ya gak konsisten juga gitu, Italia kita tau juga bahwa, kalau kita lihat ya, saya ingin mengulangi kembali informasi yang beredar dan saya kira itu adalah keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Dalam Negerinya misalnya Amerika Serikat, Amerika Serikat kita tau bahwa penanganan covidnya ancur-ancuran juga, coba kita lihat datanya. Kemudian Italia kita tau Italia juga penanganan covidnya awal-awal bahkan tinggi sekali gitu. Kemudian mungkin ya saya kira yang terlihat nyata ya dua negara tersebut ya, jadi Amerika, Italia, Inggris, Irlandia, Jepang, Jerman, Perancis, Portugal, Swedia, Swiss, Uni Emirat dan itu adalah negara-negara yang mayoritasnya apa yang jumlah muslimnya sedikit gitu, coba kalau kita lihat negara-negara yang jumlah muslimnya besar sebagaimana juga isu yang kemarin ramai dibicarakan pemerintah Malaysia telah mendapat kuota, jangankan kuota, masih di-*ban* kok posisinya.

Jadi ini saya untuk men-*disclaimer* juga kepada masyarakat bahwa saat ini belum ada penjelasan yang resmi dari pemerintah Arab Saudi tentang kuota haji yang diberikan kepada setiap negara termasuk terhadap negara-negara muslim. Jangan sampai ada *hoax* bertebaran dimana-mana yang menyebutkan bahwa hanya Indonesia yang tidak mendapatkan kuota, ini saya ingin menegaskan saja, ini bukan saya membela Pak Menteri ya tapi supaya kita juga objektif terhadap persoalan yang dihadapi saat ini di tengah pandemi covid-19.

Jadi oleh karena itu Gus Menteri saya berpikir bahwa memang sebaiknya kita segera ambil keputusan dan tetap menurut saya yang harus menjadi prioritas utama kita adalah keselamatan warga negara Indonesia. Kalau tadi dibuat skenario yang dibuat oleh Kementerian Agama harus terlebih dahulu dikarantina, karantina di tanah air, karantina sampai disana, karantina menjelang pulang, karantina setelah pulang, waktu habis untuk karantina saja, dan itu menurut saya pasti memerlukan biaya juga yang tidak sedikit walaupun kita sudah menghitung bersama-sama jumlah biaya berapa yang dibutuhkan.

Nah oleh karena itu tadi Pak Ketua jelas saya kira kita berikan kesempatan kepada Gus Menteri untuk melapor kepada presiden karena otoritas tertinggi di negara kita juga presiden dan nanti setelah mendapatkan arahan dari presiden kita kembali duduk bersama dengan Komisi VIII Gus Menteri kita sama-sama sampaikan kepada masyarakat soal apa kebijakan yang paling tepat demi kemanfaatannya gitu ya kemaslahatannya buat

masyarakat. Demi *hirosatuddin* gitu kan demi terjaganya *hifdzun nafs* bagi warga negara kita.

Yang kedua gus menteri, ini di DPR sedang siklus anggaran, jadi Pak Ketua saya izin ya ingin menyampaikan, di DPR sedang siklus anggaran, momen ini penting menurut saya untuk dimanfaatkan agar terutama soal pendidikan, alangkah lebih baiknya kita duduk bersama deh dengan Kementerian Pendidikan, mungkin kita juga duduk bersama dengan Komisi X untuk mesiasati, saya masih melihat ada ketimpangan anggaran antara pendidikan dibawah Kementerian Agama dengan pendidikan yang dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biar kemudian ini menjadi kesepakatan bersama, kita duduk satu meja berapa jumlah lembaga pendidikan dibawah Kementerian Agama, berapa lembaga pendidikan dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setarakan anggarannya termasuk juga soal bagaimana pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya untuk sektor pendidikan.

Nah nanti kami di Komisi VIII ada banggarnya, di Komisi X ada banggarnya, lalu kita lihat apakah betul ada kesetaraan pendidikan. Saya tadi pagi kirim WA ke Gus Menteri, madrasah itu juga punya keunggulan, dan itu terbukti MAN Insan Cendikia menjadi MAN terbaik kedua se-Indonesia, artinya madrasah kalau dikelola dengan baik bisa berkompetisi, jadi kalangan umatpun juga kalau diberikan kesempatan yang sama untuk diberikan satu perlakuan yang sama buktinya kita lihat bahwa prestasi-prestasi yang didapat dari kalangan madrasah juga luar biasa. Nah ini kan soal bagaimana negara mau berpihak atau tidak begitu.

Nah untuk itu Gus Menteri saya berpikir memang harus segeralah supaya kita lihat bahwa pendidikan bukan hanya pendidikan keagamaan tapi juga pendidikan yang dikelola oleh kementerian agama seperti madrasah, seperti perguruan tinggi agama islam baik negeri maupun swasta itu mendapatkan anggaran yang cukup gitu.

Jadi oleh karena itu Pak Ketua saya mengusulkan mungkin sebaiknya kita membahas secara khusus pendidikan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar keadilan anggaran juga berlaku untuk pendidikan dibawah Kementerian Agama, ini penting untuk saya tekankan karena kita ingin bahwa kualitas pendidikan di Kementerian Agama juga mendapatkan perlakuan yang setara.

Nah terakhir Bapak Ibu sekalian, tentu kita, ya termasuk juga soal PPPK karena memang secara resmi kan ditunda untuk tesnya dan untuk pemberlakuannya sebagaimana yang dilaporkan oleh Gus Menteri, yang saya dengar bahwa PPPK di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga tidak terserap dari alokasi satu juta itu. Nah kalau tidak diserap kenapa gak kita serap oleh Kementerian Agama gitu, karena masih banyak diantara guru-guru kita yang status kepegawaiannya katakanlah membutuhkan perhatian dari negara termasuk dari PPPK ini.

Jadi untuk itu saya kira ini penting untuk kita bicarakan secara bersama Gus Menteri ya karena mereka juga justru yang paling terdepan menjadi bagian dari pendidik-pendidik di tengah masyarakat kita.

Nah soal moderasi beragama mengenai kompetensi penceramah buat saya sederhana saya sih sebenarnya mendukung terhadap program ini, hanya saja memang harus dipastikan bahwa jangan sampai dispotisme negara untuk menentukan bahwa ini penceramah negara dan ini bukan penceramah negara karena urusan agama itu ya sebetulnya diserahkan kepada masyarakat itu sendiri. Jadi jangan sampai juga kena stigmatisasi yang justru menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara itu sendiri, itu yang saya kira harus dijaga.

Oleh karena itu dari sejak awal saya selalu menekankan Gus, bahwa untuk soal penceramah-penceramah itu udah diserahkan aja sama NU, ama Muhammadiyah, ama MUI gitu ya, negara fungsinya memfasilitasi aja, dan saya kira itu penting karena itu bagian dari suatu standar-standarnya kurikulum-kurikulumnya mungkin negara bisa membuat itu, tapi mungkin konteksnya adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi, kira-kira begitu lah. Masalah ini kan selalu mencuat.

Dan terakhir yang terakhir kita ramai dengar kabar kan informasi soal ini Pak Dirjen Bimas Islam, itu soal TOA pengeras suara, ini kan kemarin muncul kembali seiring dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menbatasi TOA pengeras suara hanya berlaku pada azan dan iqomah. Saya bilang kalau Indonesia lebih duluan itu, kita tahun 1978 sudah punya instruksi dirjen soal pengeras suara, bahkan pengeras suara kita hanya dibolehkan pada saat azan, kalau pengajian-pengajian itu harus menggunakan pengeras suara kedalam. Nah *problem*-nya ini kan gak banyak diketahui oleh masyarakat, belum tersosialisasikan padahal itu aturannya tahun 1978 gitu, nah mungkin saya kira itu perlu untuk direvitalisasi kembali semangatnya bahwa soal pengaturan kehidupan keagamaan kita di dalam beribadah tanpa bermaksud sama sekali kita menghalangi orang untuk beribadah tetapi juga salah satu prinsip beragama itu juga adalah jangan sampai mengganggu orang lain, harus tetap membangun kerukunan, harus tetap saling tenggang rasa, toleransi, dan lain sebagainya.

Tapi poin saya adalah mungkin saya kira secara substansi, instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 1978 itu sudah bagus Gus, cuma mungkin ini belum tersosialisasi, walaupun mau kita revitalisasi atau misalnya di di rejufinasi gitu ya bagus juga gitu sebagai bagian dari upaya kita untuk lebih mentertibkan karena mau gak mau kayak kasus di Kabupaten Tangerang kemarin, kasus Zaskia Mecca atau siapa gitu ya saya ikuti waktu bulan puasa bangunin subuh sahur sahur itu kan jadi polemik di masyarakat, hal-hal semacam ini kita harus jaga gitu. Saya kira demikian, terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamithaariq.*

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Makasih Pak Ace Wakil Ketua dari Golkar. Kami lanjutkan Ibu Diah dari PDIP.

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA (YAQUT CHOLIL QOUMAS):**

Izin Pimpinan, kalau diperkenankan mau meringankan beban sebentar ke toilet.

**KETUA RAPAT:**

Ya ya silakan, kalau itu aspirasi bawah gak bisa diwakilkan Pak. Lanjut Pak Menteri, silakan Pak Menteri. Kalau Pak Dirjen mau ikut Pak Menteri gak apa-apa juga.

Tapi tadi nanti, Pak Cholizi ini kan ada pemain-pemain baru ini Dirjen Haji kan ada pergantian pemain kan, belum dikenalkan itu. Coba dikenalkan dulu Pak

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA:**

Izin Pak Menteri, Bapaknya gak ada masalahnya. Baik Bapak terima kasih Pak Ketua, Bapak Pimpinan, dan anggota DPR Komisi VIII yang saya hormati.

Memang kami ada pergantian pemain, pertama Pak Maman Syaifullah diganti oleh Pak Jaja dari Baznas. Kemudian Pak Muhajirin Yanis alih posisi dengan Pak Syaifullah, Pak Kanwil DKI kenalnya kita. Yang terakhir Pak Arfi Hatim bergeser ke Halal Pak diganti oleh Pak Nur Arifin dari Inspektorat Pak.

Itu Pak, *alhamdulillah* sekarang pejabat di PHU sudah orang besar semua Pak, mudah-mudahan dengan kebesaran mereka ini bisa menghadapi haji tahun 2021. Makasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Makasih. Karena biar kenal aja Pak Syaiful ya, Pak Syaiful ini mantan Kanwil DKI ya. Pak Sekjen udah mendului menteri kebelakang ya, mulai berani kelihatannya Pak Menteri ini, tapi kalau urusan itu memang gak ada kompromi Pak gak apa-apa Pak. Pak Ramadhan tetap ya, Pak Jaja tadi di bagian apa? Ya ya

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA:**

Di pengelolaan keuangan haji Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya ya BPKH. Tadi sambil menunggu Pak Menteri, dengan didahului Pak Sekjen kebelakang Pak, saya minta Pak Cholil tadi memperkenalkan

pemain baru di Dirjen Haji Pak ada Pak Syaifullah Pak ini. Baik, dilanjutkan Bu Diah.

**WAKIL KETUA KOMISI VIII/F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si):**

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi beserta para Anggota, Bapak Menteri Agama dan seluruh jajarannya yang hadir.

Saya mengucapkan terima kasih Pak Menteri ini kepada panja haji pemerintah yang sampai detik ini masih fokus dengan persiapan penyelenggaraan haji walaupun keputusannya sampai saat ini belum diputuskan karena ya kita harus paham haji ini kan keputusannya bukan hanya negara kita tapi menyangkut juga Saudi Arabia jadi ada kebijakan dari negara Saudi yang korelasinya dengan keberangkatan haji kita.

Asumsinya jadi kemana-mana ini karena sampai saat ini kita belum mendapatkan, sebenarnya negara lain juga belum mendapatkan kuota ya, pengumumannya baru sebatas izin terbang. Nah itu kemudian banyak interpretasi lagi. Tapi saya percaya tentu pemerintah kita tidak jauh dari keinginan rakyatnya jadi apapun yang diputuskan oleh pemerintah itu adalah keputusan terbaik dengan berbagai banyak pertimbangan kondisi yang tentunya untuk kebaikan jemaah haji Indonesia apakah itu berangkat atau tidak berangkat *insyallah* semua hal yang menjadi pertimbangan adalah pertimbangan terbaik.

Lalu ini ada beberapa isu yang sebetulnya bukan isu baru ya kayak misalnya Tukin gitu ya, kita mungkin ingin *update* juga ini Tukin 2015-2018 ini perkembangannya gimana karena itu menjadi aspirasi panjang dari DPR RI. Lalu PPPK ya, PPPK sebetulnya kita inginnya Kementerian Agama mendapatkan lebih karena kekurangan gurunya dan status gurunya yang sebagian besar juga masih banyak guru honorer, ini juga catatan tersendiri bagi kita, mungkin perlu juga berkomunikasi dengan Menpan RB ya untuk bicara bagaimana perencanaan manajemen ASN di Kementerian Agama ya nah ini juga menurut saya hal yang perlu diperhatikan.

Yang kedua, yang menarik ini juga masalah digitalisasi madrasah, digitalisasi madrasah saya pikir gak bisa programnya tahunan ya karena bagaimana kesiapan operasionalisasinya Pak Menteri, jadi jangan kita misalnya bikin digitalisasi beli pulsa dan lain-lain tapi udah gitu gak ada operatornya, yang sudah-sudah nanti web-nya terbengkalai gitu jadi bagaimana pemeliharaan jaringan IT itu membutuhkan pendekatan SDM tersendiri apabila mungkin ini kayak misalnya metode pembelajaran *hybrid* ini mungkin akan berlangsung sampai ke depan, dan juga kesiapan madrasah yang berbeda-beda ya tiap wilayah, di satu wilayah mungkin sudah siap menerapkan IT *system* tapi di wilayah lain mungkin masih berat gitu bahkan mungkin jaringan belum ada.

Nah ini tentu anggarannya gak bisa rata, harus proporsional berdasarkan kebutuhan wilayah masing-masing. Nah tapi yang penting juga bagaimana operasionalisasi jaringan digital ini mungkin perlu diperhatikan



SDM khusus, lalu juga kita ingin juga mendapatkan *update* mengenai vaksin bagi guru madrasah apakah ada program khusus untuk vaksin guru madrasah, dan kita ingin sekali mendengar tentang bagaimana revitalisasi KUA itu sebetulnya gimana takutnya nanti tiap orang punya persepsi masing-masing nanti ya beda-beda lagi informasinya. Jadi Pak Menteri kita ingin juga, ini kan Pak Menteri banyak bicara revitalisasi KUA sebenarnya bagaimana sih kedepan gambarannya.

Lalu untuk program moderasi umat beragama kalau bisa itu menyangkut semua agama gitu jadi tidak hanya bimas islam tapi juga bimas lainnya dan tentu nanti di pembahasan anggaran 2022 kita juga punya masukan untuk meningkatkan fungsi agama di dalam Kementerian Agama karena lebih besar, mungkin fungsi pendidikannya 80 lebih ya persentasenya ya dibandingkan fungsi agama. Nah sementara hari ini kebutuhan fungsi agama juga cukup strategis dan substantif ya dan ini kita masyarakat *concern* dengan kebutuhan Kementerian Agama dalam menjalankan fungsi-fungsi agama ya termasuk salah satunya moderasi umat beragama. Nah mungkin itu saja dari saya, terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah  
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Bu Diah dari PDIP. Terakhir dari Pak Marwan, partainya Pak Menteri.

#### **WAKIL KETUA KOMISI VIII/F-PKB (H. MARWAN DASOPANG):**

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan dan para Anggota yang saya hormati  
Gus Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Mengenai haji, urusan di dalam negeri, persiapan yang bisa kita lakukan menurut saya apa yang dilakukan menteri atau yang kita siapkan di dalam panja sudah maksimal. Seluruh kemungkinan yang akan terjadi sudah kita kaji dan sudah kita siapkan dan bahkan vaksin yang dipersoalkan menurut laporan Pak Menteri tadi itu sudah diambil langkah berikutnya yaitu mendapatkan vaksin Johnson Johnson. Karena itu dalam kategori kewajiban kita dalam persiapan sebetulnya tidak ada yang salah.

Maka keputusan Saudi atau yang terkait di dalam kepastian boleh kita memberangkatkan jamaah itu dari pihak Saudi ya tentu tidak bisa kita putuskan keputusannya disana.

Maka karena itu bila kita menyebutkan bahwa informasi dua hari lalu dari 20 negara yang dilarang masuk diizinkan 11 sebenarnya tidak ada kaitan dengan kesempatan menunaikan ibadah haji, itu untuk mengunjungi Saudi, maka itu sebetulnya keliru kalau ada pendapat mengatakan wah ini kita sudah

tidak diberi sudah dilarang ini bagaimana. Menurut saya itu tidak ada kaitannya, karena itu bila saya membaca apa yang dilakukan oleh dirjen haji dalam persiapan-persiapan itu sebetulnya sudah maksimal. Menurut saya sudah ada langkah yang perlu kita hitung dan kaji tidak lagi menunggu kepastian Saudi, kita yang membuat kepastian.

Saya setelah lebaran sudah dua kali mengunjungi dapil dan melakukan dialog dengan masyarakat, satu kali pada saat puasa. Kalau kita menangkap dari masyarakat khususnya jamaah calon haji itu keinginannya luar biasa untuk berangkat haji, tetapi ketika disampaikan protokol kesehatan yang tertuang di dalam langkah-langkah kita ini sebagian besar sudah ciut nyalinya untuk berangkat, lebih baik ada kepastian tidak usah berangkat haji.

Pertama, kalau kita sebutkan bahwa di Madinah itu tidak cukup 8 hari dan melakukan ibadah Arbain, dia sudah mulai tidak tertarik melakukan ibadah haji, padahal jamaah ibadah haji kita jangankan Arbain, mengunjungi yang tidak pada urusan ibadah haji umpamanya sumur Ji'ronah yang sudah ditutup itupun tidak mengunjungi kesana bagi dia itu rugi kalau tidak kesana.

Maka karena itu yang saya tangkap ketika kita jelaskan masuk ke Madinah harus di-PCR dulu kemudian isolasi begitu berangkat ke Mekah di Mekah diisolasi di-PCR dulu mereka sebetulnya kepingin tidak lagi berangkat haji.

Lalu ada yang memplesetkan seperti yang di Madinah itu, jangankan Arbain Arba pun tidak sampai, kalau begitu di kampung kami Gus Menteri, itu bisa menjadi pedebatan, umpamanya begini ada ibu-ibu yang oleh pembimbing kelompok hajinya itu dibawa ke sumur Ji'ronah dia tidak ikut kesana, ketika pulang di tanah air dia tanya 'ikut gak ke sumur Ji'ronah?' 'gak ikut' 'wah jangan-jangan hajimu gak sah'. Ini memang ironi juga buat kita karena sosialisasi atau katakanlah manasik haji kita belum tuntas dengan baik, sekalipun memang ada yang membawa-bawa itu.

Maka karena itu saya membaca jadwal kita ini Pak Menteri, kepastian bisa memberangkatkan 1,8% pada tanggal 28 Mei itupun hanya 3660 dan itu hanya 12 kloter artinya itu satu keberangkatan kemungkinan karena pada tanggal 13 Juli itu sudah hari terakhir Mekah pun akan ditutup karena sudah memasuki untuk berangkat ke Ar-Mina, dan itu sudah lewat, besok sudah tanggal 1 Juni, karena itu menurut saya Pak Gus Menteri dalam rapat kita kali ini menyarankan sudah boleh berkonsultasi dengan Pak Presiden menjelaskan bahwa keinginan masyarakat memang kepingin haji tapi bila diceritakan proses ini sebetulnya tidak tertarik juga.

Oleh karena itu menurut saya, kita tidak lagi saatnya menunggu kepastian dari Saudi, tapi kitalah yang membuat kepastian, Pak Ace tadi sudah menyebutkan bahwa keselamatan, ketentraman, kenyamanan jamaah haji kita, kita yang membuat, maka boleh kita mengusulkan ya sudah kita tidak usah memberangkatkan jamaah haji. Kalau ada kepastian tidak memberangkatkan haji, maka pihak-pihak yang mencoba memutar-mutar informasi ini dan bahkan saya sudah masuk di *handphone* saya informasi Pak, Pak kalau ada yang berangkat haji lewat Puroda, saya bisa urus, yang begini-begini nanti bila kita tidak ada kepastian itu akan membuat orang akan

tergoda dan bisa menjadi urusan kita di belakang hari karena memang ada unsur penipuan-penipuan yang mengatasnamakan haji.

Tentu kita tidak ingin sebetulnya menyebutkan ini karena memang seluruh keputusan yang namanya pemberangkatan haji itu ada Kepres, keputusan presidenlah yang menentukan karena itu kita sudah saatnya kalau perlu pada hari rabu atau kamis kita sudah putuskan di dalam forum ini kita tidak memberangkatkan jamaah haji.

Kami kira itu bagian dari rapat kita mengenai haji, mengenai isu-isu aktual menurut saya ya kita setuju lah semuanya apa yang diperbincangkan, tentu ini ada kaitannya dengan anggaran, maka karena itu nanti kita perdalam ketika membicarakan urusan anggaran di 2022 karena sebentar lagi kita akan pembicaraan awal tentang APBN di 2022. Saya kira itu Ketua.

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Baik Pak Menteri, saya kira sangat banyak Pak penanya baik dari anggota yang hadir secara fisik maupun virtual, termasuk dari meja Pimpinan, tapi intinya hampir sama Pak bahwa dari sisi jadwal yang sudah dibuat bersama Panja Haji dan Pak Cholizi ini sudah terlampaui semua. Kemudian dari sisi yang lain kemungkinan kecil kita akan memberangkatkan haji, oleh karena itu kesempatan satu dua hari untuk bertemu presiden saya kira itu menentukan keputusan kita hari rabu Pak.

Oleh karena itu kami persilakan ke Pak Menteri untuk menjawab secara umum atau secara keseluruhan beberapa pertanyaan dari hampir semua anggota tadi hampir sama, dan yang paling penting juga mungkin begini Pak Menteri kalau nanti hari rabu ada keputusan, banyak juga yang beredar di tengah masyarakat itu begini Pak, Indonesia itu memang tidak boleh terbang ke Saudi Pak, tapi apa boleh orang Indonesia mampir dulu ke Dubai baru berangkat ke Saudi Pak, orang Indonesia Pak bukan pesawatnya Pak. Nah ini mungkin harus dijawab juga karena yang memainkan celah-celah ini banyak Pak tapi kalau kita nanti secara tegas di hari rabu kita sampaikan beberapa keputusan resmi pemerintah dan DPR saya kira itu akan menutup semua pemain-pemain yang terlalu banyak berserak hari ini Pak. Saya kira itu Pak Menteri, kami persilakan Pak Menteri.

#### **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA (YAQUT CHOLIL QOUMAS):**

Baik terima kasih Pimpinan.

Bapak Ibu sekalian Anggota Komisi VIII yang saya hormati.

Sudah banyak sekali memang yang disampaikan dan sebagian besar adalah memang untuk khazanah buat kita semua, dan saya kira saya akan

menjawab hal penting saja terutama yang pertama terkait dengan tadi yang disampaikan Pak HBA terkait dengan Ma'had Aly, Pak HBA soal Ma'had Aly soal izin operasional pendirian Ma'had Aly ini sedang kita evaluasi dengan kriteria-kriteria yang sangat ketat, sekarang sementara kita moratorium untuk mengevaluasi ini agar seperti yang tadi dikhawatirkan Pak HBA tidak terjadi gitu penurunan kualitas Ma'had Aly dan seterusnya tentu kita ingin bahwa ketika kita memberikan afirmasi terhadap pondok pesantren melalui Ma'had Aly ini juga terjawab dengan kualitas yang baik. Saya kira demikian dan *insyallah* ini kita bisa tuntaskan dengan secepat-cepatnya.

Kemudian yang terkait dengan KUA, memang KUA ini menjadi isu menarik karena memang betul bahwa KUA ini etalase bagi Kementerian Agama jadi bagaimana KUA itu ya demikian pula Kementerian Agama. Kami sengaja melakukan menjadikan KUA ini sebagai salah satu program prioritas karena salah satunya adalah karena itu bahwa ini adalah etalase, sementara memang baru kita lakukan di enam KUA jadi enam KUA itu kalau disebutkan ini ada satu di Jawa Barat, satu di Jawa Tengah, satu di DIY, satu Jatim, satu Sulawesi Selatan, dan satu di Lampung. *Insyallah* di tahun 2021 ini kita akan melakukan revitalisasi 100 KUA di seluruh Indonesia, enam KUA yang saya sebut tadi ini *pilot project*, kenapa kita pilih enam KUA ini? Karena sejauh riset yang kita lakukan, enam KUA ini yang paling siap menjadi model pelayanan terhadap masyarakat melalui KUA.

Jadi enam yang kita jadikan *piloting* ini sejauh ini sudah beradaptasi dengan pelayanan digital, jadi secara fisik tampilannya juga sudah bagus gitu, secara sumber daya manusia mereka juga sudah di-*upgrade* sedemikian rupa sehingga mampu menjawab banyak pertanyaan yang ada di masyarakat. Nah ini akan kita jadikan sebagai *pilot project* itu agar KUA yang lain bisa meniru dan tahun ini akan ada 100 KUA dan soal dapil ya kita bisa bicara lah soal penyesuaian dengan dapil, sudah ada *pilot project* nya saja gitu kan, saya kira tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan di ruangan ini.

Nah soal pelayanan kalau tadi sempat ada yang menyampaikan bahwa KUA ini terburuk pelayanan kepada masyarakat yang dinilai oleh Ombudsman juga sebaliknya, oleh Ombudsman ini tahun 2020 KUA ini dianggap atau dinilai sebagai pelayan masyarakat terbaik dengan poin 94, jadi saya kira ada yang salah data tadi dan mudah-mudahan ini bisa sekaligus menjawab kesalahan data ini.

Kemudian soal kenapa harus KUA ini harus direvitalisasi sebagaimana tadi Ibu Wakil Ketua menyampaikan, jadi memang kita tekankan kepada semua KUA ini agar mereka memegang prinsip moderat, inklusif, kemudian memberikan pelayanan yang mudah, handal, kredibel, dan tentu saja transparan dalam hal keuangan. Kami memiliki empat tujuan strategis revitalisasi KUA ini Bu, yang pertama peningkatan kualitas kehidupan umat beragama, kemudian yang kedua penguatan peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan, lalu penguatan program dan layanan keagamaan serta yang keempat peningkatan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.

Jadi kita kira-kira tidak menginginkan KUA itu sebagaimana *image* yang berkembang di masyarakat, kantor urusan agama ini kantor urusan

asmara, jadi bukan hanya urusan asmara saja yang diurus disitu tapi juga banyak hal yang harus diurus dan mudah-mudahan dengan *support* dari Bapak Ibu sekalian di Komisi VIII ini kita bisa wujudkan bersama-sama, kami sangat optimis ini bisa dilakukan, kebetulan saya kemarin hadir secara langsung di Banjarnegara gitu di salah satu lokasi *piloting* KUA ini dan memang luar biasa, pelayanannya cepat, ramah, pegawainya bersih lah kira-kira gitu, kantornya pun bersih, jadi tidak sebagaimana *image* yang saya sebutkan tadi gitu bahwa KUA ini kumuh dan seterusnya tapi memang saya kira sebagai ujung tombak kita perlu perbaiki semua, mudah-mudahan kerja sama dengan Komisi VIII bisa juga diarahkan ke KUA ini revitalisasi KUA.

Kemudian soal mahasiswa Kairo, saya akan sampaikan data agar juga tidak muncul mispersepsi atas pilihan Kementerian Agama dalam memperlakukan calon-calon mahasiswa yang akan pergi ke Mesir. Pada tahun 2020 itu ada 8387 mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir, ini data dari KBRI tahun 2021. Banyak muncul persoalan disana sebagaimana disampaikan KBRI kita di Mesir kepada kami, kebetulan kita komunikasi terkait dengan ini, jadi ada masalah mulai soal imigrasi kemudian sosial kemudian soal kesehatan lalu akademik, terutama akademik, banyak mahasiswa kita yang disana tidak menyelesaikan kuliahnya, jadi gak sampai sana. Dan soal keimigrasian karena kita, jadi begini sistem pendidikan di Mesir ini agak berbeda memang, kalau di Indonesia ini masih perlu absen kuliah, kalau di Mesir itu sudah bebas bebas aja 'lu mau absen mau kagak terserah' yang penting ketika ujian datang 'lu' kerjakan dan dianggap lulus, itu saja. Nah yang membuat anak-anak kita yang disana ini terlena sehingga tidak selesai masa belajarnya dan *overstay* dan ini *problem* buat kita yang *overstay* ini bagaimana.

*Problem* sosial pun demikian, dalam pergaulannya disana anak-anak kita ini ya karena tidak ada sistem asrama gitu atau kalau ada asrama tapi terbatas di Al-Azhar itu sehingga tidak bisa menampung semua mahasiswa. Banyak anak-anak kita itu yang mencari tempat diluar Al-Azhar, Al-Azhar itu kalau dilihat kan satu lingkungan gitu ya, nah karena asrama tidak mencukupi dan memilih diluar dan mereka bergaul dengan banyak orang disana dan sialnya banyak anak-anak kita ini yang bergaul dengan mereka yang memiliki kebangsaan yang berbeda dengan kita, misalnya masih memperjuangkan khilafah misalnya, sementara di Indonesia kan sudah gak mungkin khilafah itu. Itu soal yang paling mengemuka terkait dengan mahasiswa kita di Kairo.

Kita ini Kementerian Agama melakukan seleksi ini juga tidak sendirian, kita bekerja sama dengan banyak pihak agar seleksi yang kita lakukan itu benar-benar bisa seobjektif mungkin jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan karena terus terang Pak Jefry, kita ini lebih senang mengejar kualitas daripada kuantitas, kalau kita dorong banyak banyak-banyak calon mahasiswa disana tapi yang pulang yang jadi sarjana gak banyak ya buat apa, yang penting kualitas dan sampai disana mereka menyelesaikan studi dan membanggakan itulah kira-kira.

Nah tapi karena pandemi tahun 2020 kemarin terpaksa seleksi ini ditiadakan, jadi bukan karena kita ini menolak anak-anak mau sekolah Al-Azhar Mesir sebagaimana gosip yang beredar diluar, tidak, tapi karena pandemi 2020 seleksi ini tidak dilakukan, tapi di 2021 ini seleksi kita buka

kembali sebagaimana tadi fakta yang disampaikan dari 5000 pendaftar hanya sekitar 1200 sekian gitu yang diluluskan. Nah ini sebenarnya proses ini sudah melalui diskusi yang panjang proses seleksi ini baik dengan Kemenlu misalnya dengan konsorsium pusat pengembangan bahasa, PTKIN, PUSIBA, OIAA, dan lain-lain banyak lembaga yang kita libatkan, jadi kita ini gak asal-asalan, sekali lagi bahwa fakta yang terjadi pada anak-anak kita yang belajar disana ya itu tadi, mungkin bisa dicek langsung kalau gak percaya dengan data yang saya punya silahkan dicek sendiri gak apa-apa.

Jadi Kemenlu melalui KBRI juga merekomendasikan *passing grade* daya tampung asrama, *graduation rates*, kapasitas pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagai pertimbangan. Jadi meskipun Al-Azhar membuka siapa saja untuk bisa belajar, kita sekali lagi melalui rekomendasi Kemenlu ya untuk mengutamakan kualitas daripada kuantitas, ini saya kira sangat penting untuk kita ketahui bersama.

Kemudian soal, kita mulai dari kompetensi penceramah saja, jadi kompetensi penceramah ini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana penceramah ini memiliki pemahaman tentang moderasi beragama, dan di saat yang sama memiliki pemahaman wawasan kebangsaan yang kuat, jadi bukan sertifikasi seperti yang dibayangkan, jadi Dai kemudian dikumpulkan sama Kementerian Agama dikasih wawasan kebangsaan, dikasih moderasi, kemudian diserahkan sertifikat kemudian sertifikat ini menjadi modal atau syarat gitu ya untuk bisa berceramah, tidak seperti itu, tapi kita hanya memberikan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama, itu pun Bapak Ibu sekalian kita juga berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam, kita melibatkan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, dan ormas-ormas Islam yang lain, jadi bukan dilakukan oleh Kementerian Agama sendiri, kami tau karena kami sadar juga selain keterbatasan *resources* yang kita punya, tentu pemahaman keagamaan kita juga tidak atau beragam lah mungkin tidak sesuai atau belum memenuhi kualifikasi bisa saja. Oleh karena itu ormas-ormas Islam tetap dilibatkan sebagaimana tadi saran dari beberapa Anggota dewan yang terhormat.

Jadi ini kira-kira nanti ini juga tidak akan ber *quote and quote* tidak akan bermanfaat jika tidak ada *involving* ya keterlibatan masyarakat, kemudian kan ini akan kembali lagi kepada masyarakat untuk memilih dai mana yang atau penceramah mana yang mau diundang. Jadi kalau masyarakat masih saja mengakomodir seperti Bu Lisda tadi sampaikan bahwa penceramah yang ngomong jorok ngomong gak jelas di tempat-tempat ibadah ya itu maunya masyarakat tetapi bahwa pemerintah dan kita semua sekarang saya kira berusaha untuk memberikan pemahaman atau tambahan wawasan kepada dai agar ketika menyampaikan ajaran-ajaran Islam ini kepada publik itu benar-benar ajaran yang sesuai dengan agama Islam itu sendiri karena kita tau agama Islam ini agama yang penuh perdamaian, cinta kasih, dan menolak hal-hal yang bersifat destruktif lah saya kira begitu, jadi ini bagian dari upaya.

Nah itu, kemudian soal PPPK. Jadi sebenarnya urusan PPPK ini Bapak Ibu sekalian kita juga sudah mengusulkan kepada Menpan RB untuk sekarang ini kita sudah mengajukan sebanyak 246.716 guru atau tenaga kependidikan yang kalau di-*breakdown* itu ada 192.008 guru madrasah,

kemudian 2109 untuk ustadz pesantren, 41.502 guru PAI, 11.097 untuk dosen. Nah ini sudah kita ajukan ke Menpan RB dan mudah-mudahan tentu kita semua berharap ini bisa diakomodir untuk menjawab permintaan dari masyarakat gitu ya.

Lalu terkait dengan honor sertifikasi dosen PTKIS tahun anggaran 2020 memang terkena *refocusing* anggaran dan tahun 2021 sudah teranggarkan untuk membayar honor dan dibayarkan kepada dosen setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPKP dan mohon bersabar. Nah sementara tukin terutang yang tadi juga disampaikan mulai tahun 2015 dan tahun 2018 yang sudah melalui perjuangan dua menteri ini tidak cair, *alhamdulillah* hari ini sudah disetujui melalui SA BA BUN dan Kemenkeu nilainya kurang lebih 2 triliun, *insyallah* bulan Juli bisa mulai dibayarkan kepada guru dan dosen, jadi kita sudah menghitung tadi kita diskusi kecil itu kira-kira ada lah nanti guru yang bisa mendapatkan sampai 40 juta gitu dari ini, ini sudah sejak 2015 terutang, *alhamdulillah* hari ini kita dapat kabar gembira dan kita selesaikan dengan baik.

Bapak Ibu sekalian dan yang ini yang paling menarik soal haji, saya kira sebagaimana tadi yang banyak sudah disampaikan oleh Pimpinan terutama dan Anggota yang terhormat, memang haji ini menjadi kewenangan Saudi Arabia, pemerintah Saudi Arabia, jadi apakah dia akan membuka atau tidak haji untuk jamaah dari luar negara Saudi Arabia itu kewenangan mereka, tetapi tentu kita bisa hanya sekedar menunggu, secara teknis bersama dengan Komisi VIII Kementerian Agama juga sudah mempersiapkan hal-hal yang mesti dilakukan jika Arab Saudi kemudian membuka negaranya untuk berhaji, melakukan diplomasi juga sudah, tidak kurang-kurang saya kira pemerintah dalam melakukan diplomasi, kami secara pribadi berkomunikasi dengan Menteri Haji melalui Kedutaan Besar juga kita sudah minta agar berkomunikasi, Pak Sekjen yang pernah jadi Dirjen Haji ini sudah kita minta untuk turun tangan memanfaatkan semua jaringannya disana, Pak Dirjen PHU juga sama saja, semua kita kerahkan bahkan saya juga komunikasi, Kementerian Agama, komunikasi dan minta tolong kepada Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, dan kami intens berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melalui jejaring yang dimiliki Kementerian Luar Negeri memastikan soal penyelenggaraan ibadah haji ini.

Tetapi lagu-lagi Bapak Ibu sekalian, semua ini keputusan ada di pemerintah Saudi Arabia. Akan tetapi tentu kita tidak boleh berpangku tangan, teknis kita sudah siapkan dan saya setuju seperti yang tadi disampaikan Pak Marwan Dasopang, kita ini juga harus membuat keputusan atas ibadah haji ini. Keputusan ini saya sepakat untuk segera kita buat dengan atau tanpa pengumuman dari pemerintah Saudi Arabia. Pimpinan tadi juga sudah memberikan saran ini dan tentu saya mohon izin para Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII untuk beberapa saat berkomunikasi dengan Presiden, siapa tau ada *extraordinary decision*, kita tidak tau, saya akan sampaikan situasinya seperti apa, kita sudah menyiapkan apa, situasinya seperti apa, dan para anggota Komisi VIII ini menginginkan atau harapannya seperti apa, saya mohon waktu untuk disampaikan kepada Presiden, sebenarnya saya berharap besok tapi ternyata besok hari libur jadi mohon waktu sampai Rabu *insyallah* saya akan segera komunikasi kepada Presiden dan kita akan

membuat keputusan apakah kita menunggu terus atau kita putuskan sendiri, saya kira dengan banyak pertimbangan tadi seperti yang disampaikan oleh para anggota dan Pimpinan memang tidak mudah penyelenggaraan haji pada masa pandemi ini saya kira bayangan kita sudah tau lah kita mau apa tapi keputusan resmi sekali lagi saya mohon waktu untuk bisa menyampaikan kepada Presiden untuk kita ambil keputusan.

Saya kira demikian Ketua dan Pimpinan yang selalu saya hormati.

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Sebagai informasi Pak Menteri, kalau Rabu pagi bisa diterima Pak Presiden kita kan siang ada rapat siklus anggaran Pak untuk tahun 2022 bisa kita sandingkan dengan rapat haji, artinya rabu siang itu sudah ada keputusan pemerintah bersama DPR tentang haji tahun 2021.

Baik kita memasuki agenda yang keempat yaitu kesimpulan, tolong ditampilkan saya akan bacakan nanti tolong dicermati kalau ada penambahan atau pengurangan dipersilakan setelah saya baca dan nanti kita akan jadikan sebuah kesimpulan pada rapat kerja pada hari ini.

### Draf Kesimpulan

Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia  
Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021

Senin, 31 Mei 2021.

Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H atau tahun 2021 M dan isu-isu aktual disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai tenggat waktu maksimal pemberian kuota haji dari Arab Saudi paling lambat tanggal 28 Mei 2021 telah terlampaui, maka Komisi VIII DPR RI mendesak atau meminta Menteri Agama Republik Indonesia untuk melaporkan dan meminta arahan dari Presiden Republik Indonesia mengenai kepastian keberangkatan calon jamaah haji tahun 1442 H atau tahun 2021 M dan hasilnya disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas dan diputuskan secara bersama-sama.

Tadi Pak Menteri Rabu siang kita akan raker lagi dengan agenda siklus anggaran tahun 2022 dan bisa disandingkan dengan keputusan haji tahun 2021.

2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama Republik Indonesia untuk secara bersungguh-sungguh menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR diantaranya:



- a. Membuat terobosan dalam bentuk aplikasi manasik haji digital, tadi kata Pak Kyai Maman malas baca sekarang, memang ada semacam pergeseran kebiasaan. Manasik haji secara digital untuk meningkatkan efektivitas pembinaan bagi calon jamaah haji.
  - b. Menuntaskan peraturan turunan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, tadi sudah ada PMA tapi masalah yang lain juga belum diturunkan PMA nya seperti peraturan turunan tentang pendanaan.
  - c. Membuat KUA model atau KUA percontohan dengan memperhatikan aspirasi daerah sebagai upaya peningkatan kualitas bidang keagamaan kepada masyarakat. Tadi Pak kalau enam itu bisa ditambah 10 ya mungkin salah satunya di beberapa tempat yang gampang dijangkau oleh para Anggota Pak untuk ditinjau.
  - d. Menyusun kebijakan mengenai peningkatan kualitas lulusan lembaga pendidikan tinggi atau Ma'had Aly.
  - e. Mendukung revitalisasi unit percetakan Al-Quran atau UPQ dengan target satu juta mushaf Al-Quran dan mengkoordinasikan program wakaf Al-Quran nasional. Tadi kalau usulannya SBSN atau rupiah murni saya kira harus tergambarkan di usulan anggaran nanti Pak Menteri dan itu saya kira tidak ada satu pun anggota Komisi VIII yang berani menolak Pak, pasti menyetujuinya.
  - f. Mengusulkan penambahan alokasi formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tadi karena ada katanya slot kosong atau tidak terpakai di diknas coba dipantau kembali kalau bisa itu kita ambil untuk dibawah naungan Kementerian Agama Pak, pada tahun 2021 bagi guru agama dan guru-guru madrasah.
3. Komisi VIII DPR RI akan melakukan Rapat Kerja Gabungan bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Komisi X DPR RI, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI untuk membahas mengenai alokasi anggaran pendidikan keagamaan yang berkeadilan. Mungkin ini nanti yang memimpin Pimpinan DPR Pak rapat gabungan Komisi VIII, Komisi X, dan Menteri Keuangan untuk kita supaya madrasah-madrasah swasta dan lainnya itu bisa ... dengan anggaran yang berkeadilan.

Saya kira itu, kami persilakan sebelum Pak Menteri, mungkin dari para Anggota atau dari meja Pimpinan?

**F-P. GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI VIII:**

Saya sedikit koreksi aja yang terakhir, alokasi anggaran pendidikan dibawah Kementerian, jadi bukan hanya pendidikan keagamaan, dibawah Kementerian Agama. Ya itu aja karena kan pendidikan keagamaan kan sempit, madrasah kan bukan hanya pendidikan agama.

**KETUA RAPAT:**

Oke, yang lain? Silakan, masih ada anggota? Cukup? Pak Menteri kami persilakan, cukup ya?

Baik dengan demikian draf yang saya sudah sampaikan ada perbaikan dari Pak Ace tadi, oleh karena itu atas kesepakatan atau kemufakatan kita semua draf yang saya sampaikan tadi sudah mengalami perbaikan tidak perlu saya bacakan lagi apakah bisa kita setuju sebagai kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini? Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik terima kasih. Sebelum ditutup kami persilakan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan kata akhir dari rapat kerja pada hari ini.

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA (YAQUT CHOLIL QOUMAS):**

Terima kasih Pimpinan, saya sore hari ini merasa sebagian dari beban ini sudah terlepas gitu, karena apa yang selama berbulan-bulan kita bicarakan terkait dengan ibadah haji ini sudah mendapatkan kira-kira titik terang untuk segera kita putuskan, tinggal selangkah lagi kita putuskan. Saya kira demikian dan kerja sama selama ini dan tentu saja dukungan dari Bapak Ibu sekalian anggota Komisi VIII ini memang luar biasa dan saya kira kemewahan yang tidak dimiliki oleh Menteri yang lain.

Saya terima kasih sekali Pimpinan dan para Anggota Dewan Komisi VIII yang saya hormati dan mudah-mudahan ikhtiar kita ini benar-benar membawa kebaikan untuk bangsa Indonesia terutama dan umat islam dan calon jamaah haji yang memang selama ini menunggu-nunggu bagaimana yang akan kita lakukan dan *insyallah* apapun yang nanti kita putuskan ini pasti kita yakinkan ini yang terbaik untuk para jamaah haji dan masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ini bukti kecintaan kita kepada bangsa yang kita cintai ini dan menjadi amal jariyah untuk kita semua. Terima kasih.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Baik Pak Menteri beserta seluruh jajaran, para anggota, dan para Pimpinan. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung rapat kerja ini. Kami terima kasih sekali lagi Pak Menteri dan para anggota dan para Pimpinan, mudah-mudahan hari rabu kita bisa kembali rapat kerja dengan mengambil sebuah keputusan yang terbaik buat bangsa dan negara khususnya para calon jamaah haji.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirrabilalamin* Rapat Kerja ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.35 WIB)**

**Jakarta, 31 Mei 2021  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197309261997031001**